



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023



MAJENE UMR



UNGGUL
MANDIRI
RELIGIUS



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE INSPEKTORAT

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 103 Majene Telp/Fax. 0422-21127

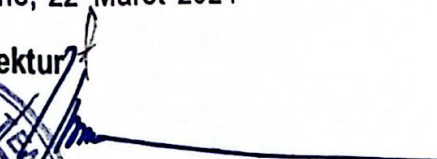
PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menjadi Tanggung Jawab Manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Majene, 22 Maret 2024

Inspektur

ANDI AMRAN, SH., MH
Pangkat / Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199403 1 002



BUPATI MAJENE

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan tepat pada waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Implementasi dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Barat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini kami sajikan dengan sistematika sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut diatas, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan umum, perencanaan pembangunan daerah dan penerapan standar pelayanan minimal.
- Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berisi tentang capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (indikator kinerja kunci keluaran; indikator kinerja kunci hasil; indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan), dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang berisi tentang Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, yang berisi tentang jenis pelayanan dasar yang diterapkan, target pencapaian SPM oleh Daerah, Realisasi SPM dan Alokasi Anggaran yang digunakan.

Bab V : Penutup.

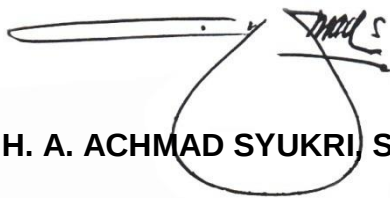
Laporan ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan, sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan strategis yang dinamis sesuai Visi dan Misi Kabupaten Majene **“MAJENE UNGGUL,MANDIRI,RELIGIUS”**.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Majene, 26 Maret 2024

BUPATI MAJENE



H. A. ACHMAD SYUKRI SE,MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.1.1. Penjelasan Umum	2
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	4
d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan	4
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	9
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	9
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	12
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	15
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	21
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	58
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	 60
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	60
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	62
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	63
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	126
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	147
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	150
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	150
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	151
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.....	154
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	155

2.3.5. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	155
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	162
3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	163
3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN	165
3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	165
3.4. PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	166
3.5. SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	167
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	170
4.1. URUSAN PENDIDIKAN	170
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	170
4.2. URUSAN KESEHATAN	178
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	178
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	192
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	192
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	199
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	199
4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	203
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	203
4.6. URUSAN SOSIAL	208
4.6.1. Dinas Sosial.....	208
4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN	213
BAB V PENUTUP	218

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan proses pengelolaan segala Sumber Daya yang dimiliki suatu Daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan tersebut, maka Pemerintah Daerah diberikan Otonomi yang seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah namun tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sejalan dengan semangat Pembangunan Kabupaten Majene dengan Visi **“MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS”**.

Sejalan dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta dijalankan mengedepankan aspek dan asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan dan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD Kepala Daerah tersebut bersifat progress report penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan amanah peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 untuk disampaikan kepada Pemerintah dan diinformasikan kepada Masyarakat sebagai media informasi dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Laporan ini disusun secara komprehensif, terintegrasi dan informatif yang memuat : Perencanaan Pembangunan Daerah; Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas : (1) Capaian Kinerja Makro, (2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, (3) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; (4) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan (5) Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Majene Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 41).

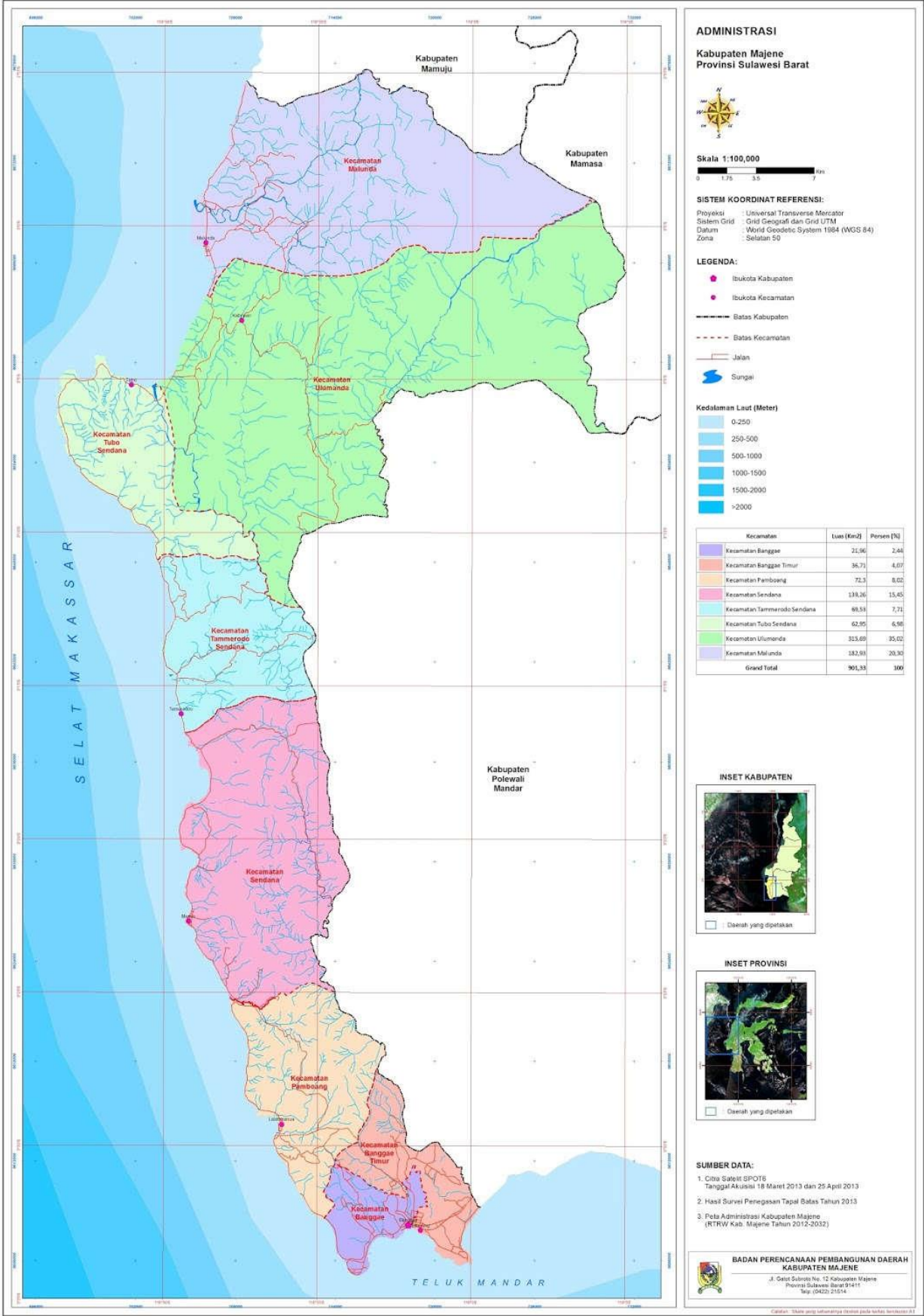
b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Majene merupakan salah satu Daerah Otonom yang termasuk dalam 6 (enam) Kabupaten dan berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki topologi daratan rendah dan daratan tinggi. Berdasarkan bentuk wilayah Kabupaten sebagai wilayah daratan yang memanjang dari selatan ke utara di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Barat, tentunya akan berimplikasi terhadap kebijakan dan program pembangunan serta konsep penataan ruangnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dan kegiatan pembangunan harus dapat diselaraskan dengan bentuk dan aksesibilitas kawasan terhadap pusat-pusat pengembangan. Tinjauan terhadap karakteristik wilayah merupakan langkah awal dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan.

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah sekitarnya ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene secara geografis terletak antara $20^{\circ} 38' 45''$ - $30^{\circ} 38' 15''$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ} 45' 00''$ - $119^{\circ} 4' 45''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah $947,84 \text{ Km}^2$ atau 5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat dan luas wilayah laut $\pm 13.124 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai $\pm 125 \text{ Km}^2$. Jarak Kabupaten Majene ke Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) Kurang lebih 146 km.



Gambar I.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat





Adapun batas-batas Administrasi Daerah Kabupaten Majene sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 184.664 Jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Banggae sebesar 45.287 Jiwa per Km² dan Banggae Timur sebesar 33.958 Jiwa per Km². Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berada di Ibu Kota Kabupaten Majene. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Ulumanda sebesar 10.468 Jiwa per Km² dan Tubo Sendana sebesar 10.124 Jiwa per Km².

Adapun Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Majene Tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Majene

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3	6
1	76.05.01	BANGGAE	45.287
2	76.05.01	BANGGAE TIMUR	33.958
3	76.05.01	PAMBOANG	25.219
4	76.05.01	SENDANA	25.761
5	76.05.01	TAMMERODO SENDANA	13.008
6	76.05.01	TUBO SENDANA	10.124
7	76.05.01	MALUNDA	20.839
8	76.05.01	ULUMANDA	10.468
JUMLAH			184.664

Sumber : Data Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Majene Tahun 2023

d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pemekaran Desa / Kelurahan, maka sejak tahun 2011 Kabupaten Majene mengalami pemekaran wilayah dari 40



(empat puluh) Desa / Kelurahan menjadi 82 (delapan puluh dua) Desa / Kelurahan. Sehingga secara Administratif Kabupaten Majene terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan, 62 (enam puluh dua) Desa.

Adapun Pembagian Administrasi, Luas Wilayah Kecamatan, Persentase Wilayah Kecamatan serta Nama Kelurahan dan Desa secara detail di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel I.2. Pembagian Administrasi, Luas Wilayah Kecamatan, Persentase Wilayah Kecamatan serta Nama Kelurahan dan Desa Kab. Majene

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Kelurahan	Desa	Ket.
1.	Banggae	25.15	2.65	Banggae	Palipi Soreang	6 Kelurahan, 2 Desa
				Baru	Pamboborang	
				Galung		
				Pangali-Ali		
				Rangas		
				Totoli		
2.	Banggae Timur	30.04	3.17	Baruga Dhua	Buttu Baruga	8 Kelurahan, 1 Desa
				Baruga		
				Baurung		
				Labuang		
				Labuang Utara		
				Lembang		
				Tande		
				Tande Timur		
3.	Pamboang	70.19	7.41	Lalampanua	Adolang	2 Kelurahan, 13 Desa
				Sirindu	Adolang Dhua	
					Bababulo	
					Bababulo Utara	
					Balombong	
					Banua Adolang	
					Betteng	
					Buttu Pamboang	
					Bonde	
					Bonde Utara	
					Pesuloang	
					Simbang	
					Tinambung	



No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Kelurahan	Desa	Ket.
4.	Sendana	82.24	8.68	Mosso	Banua Sendana	2 Kelurahan, 14 Desa
				Mosso Dhua	Bukit Samang	
					Binanga	
					Lalattedong	
					Leppangan	
					Limboro Rambu-Rambu	
					Limbua	
					Paminggalan	
					Pundau	
					Puttada	
					Sendana	
					Tallubanua	
					Tallubanua Utara	
					Totolisi Sendana	
5.	Tammerodo Sendana	55.40	5.84		Awo	7 Desa
					Manyamba	
					Seppong	
					Tallambalao	
					Tammerodo	
					Tammerodo Utara	
					Ulidang	
6.	Tubo Sendana	41.17	4.34		Bonde-Bonde	7 Desa
					Onang	
					Onang Utara	
					Tubo	
					Tubo Poang	
					Tubo Tengah	
					Tubo Selatan	
7.	Malunda	187.65	19.80	Lamungang Batu	Bambangan	2 Kelurahan, 10 Desa
					Kayuangin	
				Malunda	Lombang	
					Lombang Timur	
					Lombong	
					Lombong Timur	



No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Kelurahan	Desa	Ket.
					Maliaya	
					Mekkatta	
					Mekkatta Selatan	
					Salutahongan	
8.	Ulumanda	456	48.11		Kabiraan	8 Desa
					Panggalo	
					Popenga	
					Salutambung	
					Sambabo	
					Sulai	
					Tandeallo	
					Ulumanda	
Jumlah		947.84	100.00	20	62	

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Tabel I.3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Kerja Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023

No	OPD	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	9	10	19
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	26	12	38
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	35	29	64
4	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	9	13
5	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	97	56	153
6	PUSKESMAS DINAS KESEHATAN	59	328	387
7	BADAN PERENCANAAN DAERAH	20	12	32
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25	17	42
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	10	17
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35	3	38
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39	17	56
12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	31	17	48
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	18	11	29
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	12	23

15	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	10	16
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	27	11	38
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	43	14	57
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15	6	21
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	13	19
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	10	22
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16	28	44
22	DINAS PERHUBUNGAN	34	5	39
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6	17	23
24	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	102	59	161
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	23	4	27
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52	6	58
27	DINAS SOSIAL	8	6	14
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	26	10	36
29	KECAMATAN BANGGAE	34	32	66
30	KECAMATAN BANGGAE TIMUR	42	30	72
31	KECAMATAN PAMBOANG	22	10	32
32	KECAMATAN SENDANA	27	13	40
33	KECAMATAN TAMMERODO SENDANA	10	4	14
34	KECAMATAN TUBO SENDANA	17	4	21
35	KECAMATAN MALUNDA	26	7	33
36	KECAMATAN ULUMANDA	15	2	17
37	SEKRETARIAT DPRD	35	12	47
38	INSPEKTORAT	30	18	48
39	SEKRETARIAT DAERAH	79	44	123
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	56	147	203
41	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	179	320	499
42	SEKOLAH DASAR DAN TK	489	990	1479
43	DINAS KESEHATAN	29	31	60
44	STAF AHLI BUPATI	1	2	3
45	RUMAH SAKIT PRATAMA SALUTAMBUNG	0	0	0
JUMLAH		1883	2408	4291

Sumber : Data BKPSDM Kab. Majene Tahun 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun Realiasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 942.811.788.997,- Terbilang : *(Sembilan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)*, dan realisasi sebesar sebesar Rp. 860.469.922.264,-



Terbilang : *(delapan ratus enam puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)* atau sebesar 83,08%.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja Operasi	714.400.509.062,00	645.205.890.608,00
2.	Belanja Modal	101.261.635.004,00	89.483.699.737,00
3.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.977.663.278,00
4.	Belanja Transfer	114.632.242.203,00	112.024.733.374,00
TOTAL		942.811.788.997,00	860.469.922.264,00

Sumber : Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene Tahun 2023

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Kendala atau permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius guna mewujudkan masyarakat Majene yang sejahtera, antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia masih kurang berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional

Kualitas SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per tahun 2023 berada pada angka 72,44%. Angka ini masih berada dibawah nilai IPM Nasional yang berada di angka 72,95%, Nilai IPM yang masih rendah ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan umum seperti pelayanan Pendidikan, kesehatan serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene masih belum optimal.

Belum optimalnya aspek pelayanan umum di sektor Pendidikan salah satunya dipicu dari penurunan target angka harapan lama sekolah selama dua tahun terakhir. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 93,09% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 91,04% sehingga selisih penurunan angka harapan lama sekolah selama dua tahun terakhir sebesar 2,5%.

Penurunan angka harapan lama sekolah selama dua tahun terakhir 2022 - 2023 terjadi dikarenakan angka melanjutkan sekolah tingkat SMP mengalami penurunan sebesar 17% sedangkan tingkat SMA/SMK stagnan

dengan persentase 133%.

Pada aspek pelayanan umum sektor kesehatan terutama pada angka usia harapan hidup selama dua tahun terakhir juga mengalami penurunan persentase dari target angka yang telah ditentukan namun angka penurunannya tergolong kecil yaitu hanya sebesar 0,04%, pada tahun 2022 angka usia harapan hidup terealisasi sebesar 99,56% dan pada tahun 2023 sebesar 99,52%.

Penurunan angka usia harapan hidup salah satunya dipicu dari tidak terpenuhinya target rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2022 dan ditahun 2023, selama dua tahun terakhir rasio dokter per satuan penduduk juga mengalami dengan persentase penurunan sebesar 6%, dimana pada tahun 2022 sebesar 55% dan 49% di tahun 2023.

Selain dari permasalahan pada indikator komposit IPM sebagaimana dijabarkan di atas, pengarusutamaan gender belum berjalan optimal hingga potensi SDM di Kabupaten Majene belum dapat diberdayagunakan secara maksimal dan Mulai tergusurnya kebudayaan dan kearifan lokal di masyarakat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang maju dan berbudaya.

2. Angka kemiskinan masih terbilang tinggi yang menggambarkan bahwa masih banyak warga Majene yang hidup di bawah standar nasional

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene pada tahun 2023 berada pada angka 14,54%. Angka tersebut masih kurang dari target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit (<10%). Sehingga penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Majene menjadi hal yang sangat mendasar untuk segera diatasi.

Masih tingginya angka kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa hal. Dari segi perekonomian daerah secara umum, perekonomian masih didominasi oleh sektor primer, sehingga mobilitas sosial juga masih cenderung lambat hingga banyak masyarakat yang sulit lepas dari kemiskinan. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Majene baik dari segi eksploitasi maupun peningkatan nilai tambah juga turut berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan masyarakat. Selain itu, minimnya investasi di Kabupaten Majene menyebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.

Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak terbantu baik secara sosial kemasyarakatan maupun oleh bantuan pemerintah turut berkontribusi pada kemiskinan generasional. Akhirnya, belum maksimalnya pembangunan di perdesaan sementara mayoritas masyarakat miskin di Kabupaten Majene berada di perdesaan mengakibatkan lambatnya penanganan kemiskinan di Kab. Majene.

3. Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat akibat tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang belum optimal

Pelayanan publik di Kabupaten Majene yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat tergambar pada survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada 6 instansi publik yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Majene pada tahun 2023 hanya menghasilkan capaian 72,21. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Majene masih memiliki ruang yang luas untuk ditingkatkan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, capaian Pemerintah Kabupaten Majene pada penilaian tata kelola pemerintahan oleh pemerintah pusat juga belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena meski Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dapat dipertahankan pada opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, namun penilaian lain seperti SAKIP (predikat B), LPPD (nilai 3,43), Reformasi Birokrasi (predikat C) dan lain sebagainya masih perlu kerja keras untuk ditingkatkan capaiannya dengan harapan dengan hasil penilaian yang baik, maka pemerintahan di Kabupaten Majene dapat lebih akuntabel dan terkelola dengan baik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pelayanan kepada masyarakat pada berbagai instansi dan fasilitas pelayanan publik masih kurang efektif dan efisien yang berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan. Selain itu, sinkronisasi akuntabilitas keuangan dan perencanaan berikut kinerja masih belum memadai sehingga masih pembangunan daerah yang terencana dengan baik belum bisa dilaksanakan secara optimal. Reformasi Birokrasi yang belum berjalan secara optimal juga turut berkontribusi pada masih kurangnya kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sulit untuk segera ditangani karena kompetensi dan kesejahteraan aparat yang masih belum optimal berimbas pada kurangnya produktivitas dan motivasi kerja pegawai. Akhirnya, minimnya inovasi daerah yang dapat dijalankan secara berkesinambungan dan berdaya ungkit tinggi di masyarakat memperlambat peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Pembangunan infrastruktur masih cenderung lambat hingga menyulitkan akses ke kawasan-kawasan strategis dan potensial

Masalah infrastruktur masih menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi kabupaten Majene dan berpeluang untuk menciptakan kantong kantong kemiskinan yang baru ketika itu tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah, sehingga perlu ditingkatkan secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya, masalah belum memadainya infrastruktur akan sangat terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber- sumber ekonomi, dan kelancaran investasi di daerah.. Pembangunan infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) di daerah-daerah terisolir/terpencil perlu dilaksanakan guna membuka akses



transportasi dan arus ekonomi antar desa.

Persentase jalan dalam kondisi baik pada angka 44,31% menunjukkan bahwa aksesibilitas transportasi dalam daerah utamanya dari dan ke kawasan strategis masih tidak memadai. Hal itu tentunya berpengaruh pada kegiatan perekonomian masyarakat. Sementara untuk infrastruktur di kawasan permukiman dengan rumah tinggal bersanitasi sebesar 93,79% dan rumah tangga dengan akses air bersih sebesar 88,92% menggambarkan kondisi infrastruktur perumahan yang sudah cukup memadai untuk kehidupan sehari-hari masyarakat meski masih ada beberapa kawasan yang kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih.

Kondisi sebagaimana dijabarkan sebelumnya umumnya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur tidak optimal karena masih terpusat pada beberapa titik sementara banyak kawasan potensial dan strategis lainnya dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Selain itu, belum efektifnya sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebabkan arus logistik dalam daerah seringkali terhambat. Akhirnya masih belum optimalnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup baik dari segi kebersihan kota maupun konservasi SDA mengurangi tingkat kenyamanan hidup masyarakat.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, yaitu:

“Majene Unggul, Mandiri dan Religius”

Tabel I.5. Penjelasan Visi

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
Majene Unggul, Mandiri dan Religius	Majene Unggul	Bermakna bahwa Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan



		pemerintahan.
	Majene Mandiri	Bermakna bahwa Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.
	Majene Religius	Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman”

b. Misi Kepala Daerah

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Halini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang Unggul dan Kompetitif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel
3. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis.



Tabel I.6. Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Majene Periode 2016 - 2021

Pokok Visi	Misi RPJMD	Penjelasan Misi
Unggul	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	- Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan dan keamanan pangan; - Meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat lokal melalui konsep pendampingan dan pemberdayaan yang berbasis potensi local - Menumbuhkan iklim investasi melalui peningkatan aksesibilitas investasi dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta Sumber daya aparatur yang berkualitas - Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang berbasis IT - Penerapan <i>Good Governance</i> yang direpresentasikan melalui penerapan kabupaten cerdas (<i>smart regency</i>) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal
Mandiri	Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	- Menggali potensi keunggulan kompetitif dan komparatif sumber daya alam daerah - Meningkatkan kemampuan keuangan dan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi (intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi) dan sumber daya alam unggulan daerah - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, Industri Kreatif dan sektor jasa berbasis teknologi informasi - Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi UMKM berbasis komunitas - Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dengan memperhatikan konsep perencanaan kewilayahan, berkesinambungan dan berorientasi <i>environmental ethics</i> yang berkeadilan social
Religius	Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	Mewujudkan Kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang demokratis, Aman dan kondusif melalui penguatan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya dan kearifan lokal mandar yang malaqbiq.

Kemudian untuk mencapai kualitas perencanaan yang baik, patuh pada kaidah perencanaan harus memiliki benang merah pada semua tingkatan perencanaan mulai dari Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN) dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, maka RPJMD Kabupaten Majene harus terkoneksi langsung dengan dua dokumen tersebut. Sehingga keselarasan perencanaan dan keterpaduan dalam penyusunan program kerja mengarah pada cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah yang di dalamnya terdapat Keselarasan hubungan antara Visi dan Misi RPJPD Kab. Majene 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJPD 2005-2025	RPJMD 2021 – 2026	RPJPD 2005 – 2025
Majene Unggul, Mandiri dan Religius	Kabupaten Majene Sebagai Pusat Pendidikan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Menuju Tatanan Masyarakat Madani	Misi 1:	
Pokok Visi Majene Unggul Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Pokok Visi Majene Sebagai Pusat Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Majene diharapkan memiliki standar yang berkualitas di wilayah Sulawesi Barat, dikembangkan dengan sistem kebijakan pendidikan yang unggul melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta terciptanya iklim pendidikan yang kondusif	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	1. Mewujudkan Kabupaten Majene sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan 2. Mewujudkan penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat 3. Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 6. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas 7. Mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat 8. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam secara optimal
Pokok Visi Majene Mandiri Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri	Pokok Visi Pemenuhan TPB dalam proses pembangunan Kabupaten Majene Pembangunan berkelanjutan dalam pokok visi ini diartikan sebagai kondisi pelaksanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa sekarang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dimasa yang akan datang		



Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJPD 2005-2025	RPJMD 2021 – 2026	RPJPD 2005 – 2025
Pokok Visi Majene Religius Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri		Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	1. Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
		Misi 3: Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Mewujudkan penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat 2. Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 4. Mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat 5. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam secara optimal 6. Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam melalui konsep pembangunan berkelanjutan
		Misi 4: Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	1. Mewujudkan penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat 2. Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan

Demikian pula dengan keterkaitan antara Dokumen RPJMD harus terkoneksi langsung dengan dokumen perencanaan nasional sebagai wujud kesatuan pandang dan misi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel I.8
Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMN Tahun 2019 – 2024

Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJMN 2019-2024	Misi RPJMD 2021 – 2026	Misi RPJMN 2019 - 2024
Majene Unggul, Mandiri dan Religius	Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) majene yang unggul dan kompetitif	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
Pokok Visi Majene Unggul Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Pokok Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat	Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Pokok Visi Majene Mandiri Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan	Pokok Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Mandiri	Misi 3: Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 2. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



kemampuan sendiri			
Pokok Visi <u>Majene Religius</u> Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri	Pokok Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong	Misi 4: Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan local dan agamis	1. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa 2. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga

Terakhir akan disajikan keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menjadi salah satu prasyarat mutlak dalam perencanaan daerah sebagai bagian dari region Sulawesi Barat, dalam rangka melahirkan perencanaan yang terkoneksi langsung, selaras dengan harapan melahirkan keterpaduan dan harmoni dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene maupun dalam Wilayah Pemerintahan Sulawesi Barat secara luas.

Tabel I.9

Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Sulawesi Barat 2017 – 2022

VISI RPJMD 2021-2026	VISI RPJMD SULBAR 2017-2022	MISI RPJMD 2021 – 2026	MISI RPJMD SULBAR 2017 - 2022
Majene Unggul, Mandiri dan Religius	Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) majene yang unggul dan kompetitif	1. Membangun sumber daya Manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya



Pokok Visi Majene <u>Unggul</u> Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Pokok Visi Sulawesi Barat Maju Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.	Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi
Pokok Visi Majene <u>Mandiri</u> Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri		Misi 3: Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi 3. Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
Pokok Visi Majene <u>Religius</u> Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri	Pokok Visi Sulawesi Barat Malaqbiq Komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan	Misi 4: Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Tabel I.10 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023

Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD	104.91 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Kebutuhan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %
	Angka Partisipasi Kasar SMP	93.35 %			
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Kebutuhan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Kebutuhan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum MULOK di satuan pendidikan Dasar	100 %
			1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum MULOK di satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/ Kesetaraan	100 %
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD SD, SMP yang bersertifikasi	80%	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pemerataan Guru pada Satuan Pendidikan SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	100 %
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Izin yang 70 % diterbitkan		1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %
			1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Bahasa dan Sastra yang diKembangkan	100%	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah di Kabupaten Majene	100 %
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Fasyankes yang terpenuhi Kebutuhan ASPAK sesuai standar Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan	54.55 % 100 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan 12 Bulan layanan Kesehatan pada masyarakat dan operasional Rumah Sakit	100 %
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keluarga yang dibina dan meningkat kemandirian-nya Persentase serapan anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan	35% 94 %
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	% Fasyankes dasar dan rujukan yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis aplikasi	64%
			1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasyankes berstatus BLUD	73%
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	100%	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	% Tenaga Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktik tenaga kesehatan	70%
			1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	% Fasyankes yang memiliki dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Persentase Pemenuhan Sarana Rumah Sakit	54 % 100%
			1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Fasyankes yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu SDMK	54%
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT sesuai standar	85%	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	% Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT memiliki izin registrasi	98%
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memenuhi ketentuan	69%



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
			1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
			1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UKBM Aktif	80 %
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	86.62 % 94.35 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan perkuatan tebing dan bangunan pengaman pantai dalam kondisi baik	86.62 %
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi	94.35 %
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase Penduduk berakses air minum (Non Perpipaan)	67.85 % 32.15 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan 67.85 % dan pengembangan SPAM	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana Persampahan Regional	100%	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi Akses Sanitasi	75%	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	75 %
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	94.53 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	94.53 %
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	100%	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman	100 %
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kondisi 100 % gedung pemerintah baik		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan	100%	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100 %
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan dalam kondisi baik	96.5 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	55.33 %
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	55.33 %			
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase permohonan IUJK yang terlayani	100 %	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi	100 %
	Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %			
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketersediaan RTRW Ada dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	100%	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR		Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	
			1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100 %
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	100 %
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang	100 %
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan 60 % rumah layak huni bagi masyarakat		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %
			1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	70 %
			1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	70 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang ditangani	60%	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Proses Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	65 %
			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksanya Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksanya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	80 % 80 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100 %
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sertifikat yang di terbitkan	65%	1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	50 %
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggota linmas yang bersertifikasi Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan Rasio PPNS terhadap 65 % Jumlah Pegawai	65% 100 % 100 % 65 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Kasus Pelanggaran Perda/Perbup	100 %
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan SDM Satpol PP dalam Karier PPNS	65 %
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penangani Bencana	100%	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Subkegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2 Sub kegiatan
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Subkegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9 Sub kegiatan
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Subkegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 Sub kegiatan
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Subkegiatan Penataan Sistem Pananggulangan Bencana	1 Sub kegiatan
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Peningkatan responsifitas dalam penanganan kebakaran	100%	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subkegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun	3 Sub kegiatan
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	2 Sub kegiatan
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Program Pemberdayaan Sosial	100%	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Tepencil	2 Sub Kegiatan
			1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kab/Kota	1 Sub Kegiatan
			1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jum sub Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah kab/Kota	5 Sub Kegiatan
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Sub Kegiatan Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kab/Kota untuk dipulangkan Ke Desa/ Kelurahan Asal	1 Sub Kegiatan
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	60%	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	12 Sub Kegiatan



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
				di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	7 Sub Kegiatan
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	90%	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	3 Sub Kegiatan
			1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan derah Kab/Kota	4 Sub Kegiatan
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	85%	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	5 Sub Kegiatan
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kab/Kota	5 Sub Kegiatan
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	3 Sub Kegiatan
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Ada Perencanaan Tenaga kerja		2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah sub kegiatan dokumen perencanaan tenaga kerja	2 Item
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	90% 80 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah sub kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	2 Item
			2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah sub kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	2 Item



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Produktivitas Tenaga Kerja tingkat daerah Kabupaten/ Kota	2 Item
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan pencari kerja	100%	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sub kegiatan Pelayanan antar kerja di Kabupaten/Kota	1 Item
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Perlingdungan PMI (Pra dan purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	1 Item
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	100%	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	1 Item
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Item
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga PUG yang aktif	45%	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	37 %			
	Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender	65 %			
			2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %
			2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %
			2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	90%	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
	Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	40 %			
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	45%	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100 %
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	30%	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
	Persentase Pemenuhan Hak Anak	70 %			
			2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus 100 % kekerasan terhadap anak yang di tangani		2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persetase lumbung 100 % pangan masyarakat yang aktif		2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 %
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kesiediaan Pangan Utama Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89.06 % 78.70 (nilai)	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan	100 %
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100 %
			2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Dokumen Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal	1 Dokumen
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100 %
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan	7.32 %	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Pemenuhan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100 %
			2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Jumlah Subkegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Kabupaten/Kota		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pengajuan izin lokasi yang disetujui	60%	2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Terlaksana Pemberian Izin 40 % Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota"	100 %
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	65%	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	55%	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat	65%	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	100 %
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	55%	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	40 %
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas lahan yang bersertifikat	50%	2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya penerbitan izin membuka tanah	100 %
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	50%	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	40 %
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	1 Keg



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/Kota	1 Keg
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	58.95 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah sub kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	3 Keg
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64.02 %			
	Indeks Kualitas Udara	84.51 %			
			2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH kab/Kota	1 Keg
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH kab/Kota	1 Keg
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas RTH yang tersedia	75%	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Sub kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota	4 Keg
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	100%	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah sub kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	1 Keg
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	90%	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 keg



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat / Komunitas peduli Lingkungan Hidup yang mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	100%	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersenggaranya pendidikan, 4 Keg pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga masyarakat	100 %
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Klasifikasi Kelas Adipura	IV (Peringkat)	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan 1 Keg Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota yang dilaksanakan	100 %
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100%	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota yang dilaksanakan	2 keg
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Cakupan area penanganan persampahan	64.20 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Sub Kegiatan pengelolaan Sampah yang dilaksanakan	5 Keg
	Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R	22 %			
	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	65.80 %			
	Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan	15.85 %			
			2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta yang dilaksanakan	1 Keg
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA Persentase Kepemilikan KK Persentase Kepemilikan	30% 100 % 100 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Subkegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	KTP				
			2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Subkegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Subkegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang Dilaksanakan	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	100%	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Subkegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	
	Persentase Kepemilikan Akte	100 %			
	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran	97 %			
			2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Subkegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan database kependudukan	100%	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Subkegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang Dilaksanakan	
	Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan	100%			
			2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Subkegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Dilaksanakan	
			2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan	100 %
			2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	100 %
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentasi jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa		
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa		
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate)	2.56	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	74.11 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %
	Persentase Kampung KB	34 %			
	Presentase peserta KB aktif MKJP	32 %			
	Unmetneed	9.82 %			
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	100 %
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB	79%	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	87%	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	100 %
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	100 %
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal	100 %
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat upaya Kelaikan Keselamatan Kendaraan	100 %
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konetivitas Transportasi Publik	100 %
			2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan rencana umum jaringan Trayek Perkotaan dalam daerah	100 %
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	80%	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Massa Elektronik dan Non Elektronik	85 %
	Persentase PPID yang aktif	100 %			
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	3 Poin	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Subdomain dan Jaringan Intra dalam Lingkup Pemerintah Kab. Majene	85 %
	Jumlah sistem yang sudah terintegrasi	2 informasi			
	layanan yang sudah berbasis digital	1 Layanan			
	Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan				



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	internet				
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan E- Government	85 %
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP Yang Difasilitasi Perizinannya	2500%	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Yang Diterbitkan	5 Izin
				Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan USP	5 Izin
			2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	21.10 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	23 Koperasi
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan kriteria penilaian	57.50 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP dan USP Yang Sehat	23 KSP
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengelola Koperasi Yang Bersertifikat Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.88 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang Terlatih di Bidang Perkoperasian	530 Orang
		0.92 %			
			2.17.05.2.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			2.17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	5.05 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang		



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Persentase UMKM Yang Diberdayakan Persentase Usaha Mikro Yang Melakukan Kemitraan	4.33 % 0.9 % 0.20 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang Dibina dan Difasilitasi	815 UMKM
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	0.16 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Dikembangkan Menjadi Usaha Kecil	24 UMKM
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dokumen Pengembangan iklim penanaman modal	2 Dok	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Sub Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	6 Kegiatan 2 Sub Kegiatan
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Potensi Investasi Kabupaten Majene	6 Kegiatan 2 Dokumen
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dokumen Strategi Penanaman Modal Jumlah Nilai Investasi Persentase kegiatan promosi penanaman modal	Ada 140 Milyar 40%	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kegiatan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Majene	2 Sub 65 %
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/ Non Perizinan) Persentase layanan	80 point	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Izin Terbit Sesuai Dengan SOP dan Usaha Peraturan Perundang-Undangan Persentase Penyelenggaraan	1200 Izin



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100 %	Daerah Kabupaten/ Kota	Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Majene	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	85%	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan
				Jumlah Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sub
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	45%	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Kegiatan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	100%	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	100 %
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten	100 %
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	100%	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten	100 %
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten	100 %
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestase Tingkat Provinsi	100 %
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 %
			2.19.03.2.05	Persentase Pembinaan	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	40%	2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Antar Perangkat Daerah	20 %
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
			2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
			2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %
			2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kelompok Literasi yang dibina	100%	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan memenuhi standar nasional	26 perpustakaan
	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	35 %			
	Persentase Perpustakaan yang di bina	100%			
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1000 pengunjung
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentasi Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya	21%	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik yang Dilestarikan	2 naskah Daerah
			2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diadakan	2 koleksi
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	80%	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit arsip yang dikelola dan ditata	4 unit
			2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola	4 unit
			2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penerapan Arsip Terintegrasi	1 instansi
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang didokumentasikan (scan)	15%	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah	2 unit
			2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip	2 kegiatan
			2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip	2 kegiatan
			2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan autentitas arsip kabupaten	2 kegiatan



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	2 kegiatan
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penggunaan Arsip bersifat tertutup yang dikelola	70%	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	1 SOP
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Presentase 100 % Pengelolaan Perikanan Tangkap		3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentasi Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah	100 %
			3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100 %
			3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %
			3.25.03.2.05 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase 100 % Pengelolaan Perikanan Budidaya		3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	100 %
			3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentasi Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentasi Pengelolaan Pembudidaya Ikan	100 %
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100%	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Presentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100 %
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	100 %
			3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyedia dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 %
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota		
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		
			3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
			3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	5% 5 % 5 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	75 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	5 %			
			3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG dan Mikroorganisme yang dikelola	2 Teknologi
			3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan yang dilakukan	3 Keg
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penambahan Populasi Ternak	350 Ekor
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	75%	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dikembangkan	2 Unit
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang dibangun	100 Unit
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	100%	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	4 Kegiatan
			3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan yang diberikan	20 Pelayanan
			3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Persyaratan Teknis yang di terapkan	10 kategori
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Hama Penyakit yang ditangani	80%	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian yang dilakukan	10 Keg
	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	65 %			
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti		3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin 150 izin Usaha Pertanian	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan Petani yang di Bina Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80% 100 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang Mengikuti Kegiatan	127 Orang
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	77%	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Usaha Yang Memperoleh Rekomendasi	100 Usaha
			3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
			3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		
			3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		
			3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
			3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik	59,09%	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Distribusi Dibangun dan Dikelola	20 Sarana
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	100%	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	8 Kecamatan



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Usaha Komoditi Ekspor Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan	40%	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor Unggulan	1 Event
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	100%	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Tera Yang Alat Diawasi dan Ditera Tera	1914
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	20%	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran yang dilakukan	1 Event
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri Persentase Sentra Industri Aktif	66% 66 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	11 Dokumen
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM Yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	50%	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan IKM Yang Didata dan Ditangani	100 Perizinan
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM Yang Teradaftar di SIINas	50%	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Terdata melalui SIINas	100 IKM
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
3.32.02 PROGRAM	Tersedianya Dokumen		3.32.02.2.01	Jumlah sub kegiatan	1 Sub



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Ada Perencanaan Transmigrasi		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi Umum	100%	3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	3 item
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan	100%	3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah sub kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap Kemandirian	2 item
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat Daerah Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik	100% 80 % 100%	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Pemenuhan Fasiliatas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Peningkatan Fsilitas Penataan Organisasi	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Peningkatan Fasilitas Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam Dokumen LPPD	100 %
	Persentase Fasilitas layanan Kesra	100%			
	Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	100%			
	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	90%			
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Peningkatan kualitas Produk Hukum yang diterbitkan dan Ditetapkan	100 %
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	100 %
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitas Kebijakan Perekonomian	100%	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Peningkatan Fasilitas Kebijakan Perekonomian	100 %
	Persentase Fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan	100 %			
	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemantauan SDA	100%			
	persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	100%			
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Peningkatan Fasilitas Kegiatan Administrasi Pembangunan	100 %
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara elektronik	100 %
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Peninkatan Fasilitas Kegiatan Pemantauan SDA	100 %
4.02 SEKRETARIAT DPRD					
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi	100%	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Hasil Ranperda yang dibahas	100 %
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Indeks kebijakan anggaran SKPD	100 %
			4.02.02.2.03 Pengawasan	Indekas Pengawasan Penyelenggaraan	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan	
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Indekas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Hasil Penyaluran Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %
			4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Indekas Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode etik DPRD	100 %
			4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Hasil Program Kegiatan Kerja Sama Pemerintah Daerah	100 %
			4.02.02.2.08 Fasilitas Tugas DPRD	Indeks Program Kerja DPRD	100 %
5.01 PERENCANAAN					
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	100%	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah	10 Dokumen
	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	100 %		Hasil Verifikasi Usulan Musrenbang	8 Dokumen
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen
			5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan SIPD e-sistem Database	1 Sistem
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100%	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Bidang Koordinasi
				Monitoring dan evaluasi dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Bidang Koordinasi
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Bidang Koordinasi
				Monitoring dan evaluasi dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Bidang Koordinasi



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Bidang Koordinasi
				Monitoring dan evaluasi dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Bidang Koordinasi
5.02 KEUANGAN					
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu pengesahan APBD	Tepat Waktu	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11 Item
	Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu			
	Opini BPK	WTP			
	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	100%			
	Persentase SiLPA Terhadap APBD	1.40 %			
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Yang Dilaksanakan	9 Item
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Dilaksanakan	10 Item
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Item
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	70%	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Item
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	100%	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah subkegiatan Pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan	100 %
5.03 KEPEGAWAIAN					
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	80 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Subkegiatan 6 Item Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dilaksanakan	100 %
	Persentase data kepegawaian yang up to date	100 %			
	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 %			
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Subkegiatan Mutasi 3 Item dan Promosi ASN yang dilaksanakan	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Subkegiatan 1 Item Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan	100 %
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Subkegiatan 4 Item Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dilaksanakan	100 %
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural	38%	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Penyelenggaraan 1 Item Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 %
	Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	15 %			
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Subkegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan	1 Item
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	100 %			
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	100%	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %
	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %			
	Persentase OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B	14 OPD			
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan	97 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
			Tertentu	Tujuan tertentu	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	6 OPD	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penguatan Apip dan Implementasi Sakip Dan RB Secara Konprensif	100 %
			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	100 %
7.01 KECAMATAN					
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %
	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae	80 %		Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Instansi Vertikal	
	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae Timur	80 %		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Tubo Sendana	80 %			
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daera	100 %
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae	98%		Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae Timur	98%		Persentase Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tubo Sendana	98%		Persentasi kelancaran Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tubo Sendana	98%			



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
	masyarakat terfasilitasi Kecamatan Ulumanda				
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %
			7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tubo Sendana ,Kecamatan Ulumanda	54%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
			7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terselenggaranya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %
			7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumn	100 %
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae Timur	98%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu Kecamatan Banggae Timur	54%	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %



Program			Kegiatan		
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam pengembangan politik	100%	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang di berdayakan	100%	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah ditujukan selain mengejar pertumbuhan ekonomi juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sedangkan urusan untuk pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bermakna bahwa didalam urusan pemerintahan wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan yang wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pendidikan;
- 2) Urusan Kesehatan;
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Urusan Ketentraman ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Urusan Sosial.

Standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam konstektual sebagai norma, standar prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar berhak diperoleh setiapwarga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar,kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah . oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana , konkrit,mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene menyusun rencana pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan/ keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam

rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja OPD). Kebijakan Anggaran Umum (KUA), Rencana Kerja dan rencana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator Kinerja Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, dimana capaian kinerja dari indikator makro tersebut merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional. Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Majene

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja 2023
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,64%	72,44%	1,117%
2.	Angka Kemiskinan	15,13%	14,54%	-3,9%
3.	Angka Pengangguran	2,19%	2,64%	20,548%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	2,39%	5,28%	120,921%
5.	Pendapatan Per Kapita	7,67%	9,18%	19,687%
6.	Ketimpangan Pendapatan(Gini Ratio)	0,37%	0,34%	-8,108%

Sumber : Badan Pusat Statistika Tahun 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh Pendapatan, Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Majene tercatat 72,44%. Angka ini tumbuh sebesar 1,117 persen dibanding keadaan tahun 2022.

2. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene pada tahun 2023 tercatat 14,54% yang menandakan bahwa laju kinerja pada tahun 2022 sebesar -3,9%.

3. Angka Pengangguran

Tinggi rendahnya angka pengangguran disuatu daerah dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Majene angka TPT pada tahun 2023 adalah 2,64%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data lima tahun terakhir, kondisi perekonomian di Kabupaten Majene relatif mengalami perlambatan. Perlambatan ini lebih diakibatkan oleh tekanan ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas harga di dalam negeri dan berimbas pada perlambatan kinerja perekonomian daerah di Kabupaten Majene.

Di tahun 2018 tumbuh 6,06%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing menjadi 6,02% dan 6,01%. Untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mengalami penurunan yakni sebesar -1,38% dan kembali terjadi peningkatan pada tahun 2022 yaitu menjadi 2,39% kemudian meningkat secara pesat pada tahun 2023 menjadi 5,28%.

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita di Kabupaten Majene Tahun 2023 tercatat sebesar 9,18 persen per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,67 persen.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Majene Tahun 2023 tercatat sebesar 0,34% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,37% dengan laju kinerja mencapai -8,108%.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data / informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :



2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
1.	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	202	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	
			2) Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah	-		
			3) Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	7.993		
			4) Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD	-		
			5) Jumlah Pendidik pada PAUD	599		
			6) Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini	323		
			7) Jumlah Kepala Sekolah PAUD yang memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal dari Lembaga Pemerintah	115		
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 -12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	8) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	209		
			9) Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar yang menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah	500		
			10) Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah	400		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			11) Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	14782	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	
			12) Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	6324		
			13) Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik padaJenjang Sekolah Dasar	-		
			14) Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik padaJenjang Sekolah Menengah Pertama	557		
			15) Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar	1799		
			16) Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	732		
			17) Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar	714		
			18) Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	174		
			19) Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar	588		
			20) Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	349		
			21) Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	566		
			22) Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	341		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			23) Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	147	Dinas Pendidikan dan PemudaOlahraga	
			24) Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat TandaTamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	24		
			25) Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah SMA/Sederajat	516		
			26) Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki Ijazah SMA/Sederajat	294		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	46) Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	18		
			47) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah	1293		
			48) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	1293		
			49) Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	144		
			50) Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	7		
			51) Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Ijazah Diploma Empat(D-IV) atau Sarjana (S1)	187		
			52) Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	142		
			53) Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Ijazah D- IV atau S1	20		
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	1) Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar	1 UNIT	Dinas Kesehatan dan RSUD	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	2) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan Akreditasinya	1 UNIT	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia	3.929 PAKET		
			4) Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Antenatal	832 PETUGAS		
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	5) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia	3.707 PAKET		
			6) Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Persalinan sesuai Standar	832 PETUGAS		
		Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia	3.797 PAKET		
			8) Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Neonatal Esensial sesuai Standar	834 PETUGAS		
		Presentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	9) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia	9.192 Paket		
			10) Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	854 Petugas		
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	11) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia	25.691 Paket		
			12) Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai Standar	934 Petugas		
		Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	13) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia	96 Paket Posbindu Kit 60.961 Paket		
			14) Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	920 Petugas		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Persentase Warga NegaraUsia 60 Tahun keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	15) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yangTersedia	7.688 Paket	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	
			16) Jumlah SDM Kesehatan untuk PelayananKesehatan sesuai Standar	920 Petugas		
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan PelayananKesehatan sesuai Standar	17) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yangTersedia	96 Paket		
			18) Jumlah SDM Kesehatan untuk PelayananKesehatan sesuai Standar	897 Petugas		
		Persentase Penderita DM yang mendapatkan PelayananKesehatan sesuai Standar	19) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yangTersedia	8.556 Paket		
			20) Jumlah SDM Kesehatan untuk PelayananKesehatan sesuai Standar	920 Petugas		
		Persentase ODGJ Berat yangmendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwasesuai Standar	21) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yangTersedia	11 Paket		
			22) Jumlah SDM Kesehatan untuk PelayananKesehatan sesuai Standar	370 Petugas		
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan PelayananTBC sesuai Standar	23) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yangTersedia	4.109 Paket		
			24) Jumlah SDM Kesehatan untuk PelayananKesehatan sesuai Standar	457 Petugas		
		Persentase Orang denganResiko Terinfeksi HIV mendapatkan PelayananDeteksi Dini HIV sesuai Standar	25) Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yangTersedia	4.615 Paket		
			26) Jumlah SDM Kesehatan untuk PelayananKesehatan sesuai Standar	908 Petugas		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	1) Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kabupaten (Ha)	258,64 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			2) Panjang Sungai di Kawasan Permukiman yang Rawan Banjir di WS Kewenangan Kabupaten (m)	65,49 Km		
			3) Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai yang Rawan Abrasi Erosi dan Akresi di WS Kewenangan Kabupaten (Ha)	12,602 Ha		
			4) Panjang Pantai di Kawasan Permukiman yang Rawan Abrasi, Erosi, Akresi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	90,39 Km		
			5) Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan / Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			6) Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan / Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			7) Data Prasarana dan Sarana Pengaman Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kabupaten	Jumlah - Bangunan Perkuatan Tebing : 1729,9 M - Tanggul Sungai : - Kanal Banjir : - Pintu Air Bendung Pengendali Banjir : - Polder / Kolam Retensi Breakwater : - Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya : 468,5 M		
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	8) Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dalam Kondisi Baik	1961,21		
			9) Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	11510,26		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Persentase Jumlah RumahTangga yang mendapatkan Akses terhadapAir Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan JaringanPerpipaan terlindungi terhadapRumah Tangga di Seluruh Kabupaten	10) Persentase Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik	10108	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			11) Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten	Ada		
			12) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADAKabupaten	Ada		
			13) Jumlah BUMD dan atau UPTD KabupatenPenyelenggaraan SPAM	1		PDAM
			14) Jumlah Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan PenyelenggaraanSPAM	SURAT KETERANGAN		PDAM
			15) Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain	SURAT KETERANGAN		PAMSIMAS dan Hibah Air Minum
		Persentase Jumlah Rumahyang memperoleh LayananPengolahan Air Limbah Domestik	16) Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD S	27.999 Unit		
			17) Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-T	650 Unit		
			18) Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat dan data Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	27.712 Unit		
			19) Jumlah Rumah yang sudah MenerimaPelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	145		
			20) Jumlah Rumah yang sudah MenerimaPelayanan Jasa Pengolahan Lumpur Tinja	145		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			21) Jumlah Rumah yang sudah Menerima Pelayanan Jasa Pengolahan Air Limbah Domestik	145	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			22) Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	69,33%		
			23) Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	0,51%		
			24) Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman	1,62%		
			25) Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	70,05%		
			26) Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	25%		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			27) Kinerja Penyediaan Prasarana PengolahanLumpur Tinja	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			28) Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yangTersambung ke IPALD	100 %		
			29) Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan LumpurTinja	0,37 %		
		Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	30) Rasio Bangunan Gedung (kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi	Ada		
			31) Jumlah IMB yang diberikan oleh PemerintahKabupaten dalam Tahun Eksisting	37 Unit		
			32) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan / Gedung	SURAT KETERANGAN		
			33) Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim AhliBangunan / Gedung	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			34) Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	SURAT KETERANGAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			35) Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	SURAT KETERANGAN		
			36) Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			37) Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kabupaten yang dipelihara / dirawat	SURAT KETERANGAN		
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	38) Panjang Jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten	621,20 Km		Tidak ada pekerjaan jembatan tahun 2021
			39) Panjang Jalan yang dibangun	38,693 Km		
			40) Panjang Jembatan yang dibangun	0,0056 Km		
			41) Panjang Jalan yang ditingkatkan (Struktur /Fungsi)	SURAT KETERANGAN		
			42) Panjang Jembatan yang diganti / dilebarkan	SURAT KETERANGAN		
			43) Panjang Jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	9,801 Km		
			44) Panjang Jembatan yang direhabilitasi	SURAT KETERANGAN		
			45) Panjang Jalan yang dipelihara	5,596 Km		
			46) Panjang Jembatan yang dipelihara	0,0014 Km		
		Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	47) Jumlah Pelatihan Tenaga Operator / Teknisi / Analisis di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			48) Jumlah Tenaga Kerja Operator / Teknisi / Analisis yang Terlatih di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			49) Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang Tersertifikasi Operator / Teknisi / Analis di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada, di OPD kami belum ada Bid. Jasa Konstruksi
			50) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang Aktif dengan Data Termutakhir	SURAT KETERANGAN		
			51) Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten untuk Tahun berjalan yang Bersumber dari APBD Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			52) Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten untuk Tahun berjalan yang Bersumber dari APBN	SURAT KETERANGAN		
			53) Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten untuk Tahun berjalan yang Bersumber dari Pendanaan Lainnya	SURAT KETERANGAN		
			54) Tersedianya Data dan Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai Kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Termutakhir secara Berkala	SURAT KETERANGAN		
			55) Tersedianya Data dan Profil OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			56) Tersedianya Data dan Informasi Pelatihan Tenaga Operator dan Teknisi / Analis Konstruksi di Wilayah Kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh Menteri yang Membidangi Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah Lainnya	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			57) Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknisi / Analis	SURAT KETERANGAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada, di OPD kami belum ada Bid. Jasa Konstruksi
			58) Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang Tersertifikasi Operator /Teknisi / Analis di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			59) Tersedianya Data dan Informasi Badan Usaha yang mendapatkan Pembinaan di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			60) Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan Komitmen Permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui	SURAT KETERANGAN		
			61) Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pengawasan Ketidaksesuaian Jenis, Sifat,Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	SURAT KETERANGAN		
			62) Tersedianya Data dan Informasi Kecelakaan Konstruksi pada Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	SURAT KETERANGAN		
			63) Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pengawasan Ketidaksesuaian Jenis, Sifat,Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	SURAT KETERANGAN		
			64) Jumlah Badan Usaha yang memiliki IUJKN diWilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			65) Jumlah Usaha Perseorangan yang memilikiTDUP di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			66) Jumlah Badan Usaha yang memiliki IUJKN yangterlibat dalam Proyek di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada, di OPD kami belum ada Bid. Jasa Konstruksi
			67) Jumlah Badan Usaha yang mendapatkanPembinaan di Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			68) Jumlah Pemenuhan Komitmen PermohonanIUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui	SURAT KETERANGAN		
			69) Jumlah Pengawasan terkait Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadiKewenangan Pengawasannya	SURAT KETERANGAN		
			70) Jumlah Kecelakaan Konstruksi pada Proyekyang menjadi Kewenangan Pengawasannya	SURAT KETERANGAN		
			71) Jumlah Pengawasan terkait Ketidaksesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, Layanan Usaha, Bentuk dan/atau Kualifikasi Usaha dengan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	SURAT KETERANGAN		
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	1) Jumlah Rumah yang berada pada KawasanRawan Bencana dan Rencana Penanganannya	SURAT KETERANGAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			2) Jumlah Rumah yang terkena Bencana Alam	133 unit		
			3) Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban yangRumahnya terkena Bencana Alam	5343 unit		
			4) Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yangdirehabilitasi sesuai dengan Rencana Aksi	4225 unit		
			5) Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yangdibangun kembali sesuai dengan Rencana Aksi	SURAT KETERANGAN		
			6) Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang dibangun baru / Relokasi sesuai dengan Rencana Aksi	24		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			7) Jumlah Unit dan Lokasi Rumah Sewa yang akan menjadi Tempat Tinggal Sementara Korban Bencana	SURAT KETERANGAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			8) Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban Bencana yang Terfasilitasi	SURAT KETERANGAN		
			9) Jumlah, Luasan dan Lokasi Pencadangan Lahan	SURAT KETERANGAN		
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	10) Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang telah Mendapatkan Fasilitas Ganti Kerugian Aset Properti berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM	SURAT KETERANGAN		
			11) Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang belum Mendapatkan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM	SURAT KETERANGAN		
			12) Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan Subsidi Uang Sewa berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM	SURAT KETERANGAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			13) Jumlah Rumah Tangga Penerima Kegiatan Layanan yang telah Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM	SURAT KETERANGAN		
			14) Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang belum Mendapatkan Penyediaan Rumah Layak Huni berdasarkan Rencana Pemenuhan SPM	SURAT KETERANGAN		
			15) Jumlah Total Luasan (Ha) Pengadaan Tanah	SURAT KETERANGAN		
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	16) Jumlah Luasan (Ha) Kawasan Permukiman Kumuh < 10 Ha	8,0 ha		
			17) Jumlah Unit Peningkatan Kualitas RTLH	289 unit		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	18) Jumlah Luasan (Ha) Penanganan InfrastrukturKawasan Kumuh	170,61 ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			19) Jumlah Rumah di Kabupaten	39.031 unit		
			20) Jumlah Unit PK RTLH	289 unit		
			21) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	31.509 unit		
			22) Jumlah Rumah yang Tidak Dihuni	SURAT KETERANGAN		
			23) Rasio Rumah dan KK	0,13		
			24) Jumlah Rumah Pembangunan Baru	SURAT KETERANGAN		
		Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	25) Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	12 Perumahan		
			26) Jumlah Unit Rumah yang sudah Difasilitasi AirMinum	940 unit		
			27) Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi JalanLingkungan	765 unit		
			28) Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi AksesSanitasi (On Site / Off Site)	100 unit		
			29) Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi RTNH	120 unit		
			30) Jumlah Unit Rumah yang Terfasilitasi AksesPJU	480 unit		
			31) Jumlah Pengembang yang Tersertifikasi	SURAT KETERANGAN		
			32) Jumlah Pengembang yang Terregistrasi	SURAT KETERANGAN		
			33) Jumlah Pengembang yang MendapatPenyuluhan atau Pelatihan	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1) Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibumdalam Kabupaten yang ditangani	8	Dinas Satuan PolisiPamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
			2) Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	55		
			3) Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan KepalaDaerah yang ditegakkan	1		
			4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memilikikualitas sebagai PPNS	47		
			5) Tersedianya SOP dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penanganan Gangguan Trantibum	Surat keterangan belum adanya Tersedianya SOP dalam Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah serta Penanganan Gangguan Trantibum	Dinas Satuan PolisiPamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
			6) Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	Surat keterangan belum ada tersedianya sarana dan prasaranaminimal tahun 2020		
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana		7) Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan dinyatakan Sah / Legal	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			8) Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	80 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	9) Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai dinyatakan Sah / Legal	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			10) Persentase Penyelesaian Dokumen Renkons sampai dinyatakan Sah / Legal	100 %		
			11) Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan	420		
			12) Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan	420		
			13) Persentase Warga Negara yang mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	25.416		
			14) Persentase Warga Negara yang mendapat Peralatan Perlindungan	100 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15) Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24Jam untuk Setiap Status KLB	19 Menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			16) Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	100 %		
			17) Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalamPenanganan Darurat Bencana	23		
			18) Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi terhadap KejadianBencana	2		
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan EvakuasiKorban Kebakaran	19) Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			20) Tersedianya Pos Sektor Damkar yang dilengkapi Sarana Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			21) Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan	SURAT KETERANGAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			22) Pos Damkar yang dilengkapi dengan Sarana / Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Keluarahan / Desa	SURAT KETERANGAN		
			23) Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	SURAT KETERANGAN		
			24) Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	117		
			25) Jumlah Relawan Kebakaran dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	132		
			26) Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	25		
6.	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	1) Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	3	Dinas Sosial	
			2) Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	448		
			3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			4) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang dijangkau	448	Dinas Sosial	
			5) Jumlah Kendaraan Roda Empat yang AksesKhusus Layanan Kedaruratan yang dimiliki	1		
			6) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	448		
			7) Jumlah Rumah Singgah / Shelter / TempatTinggal Sementara yang dimiliki Sesuai Standar	10		
			8) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang	0		
			9) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	3		
			10) Jumlah Alat Bantu yang tersedia di RumahSinggah / Shelter	10		
			11) Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan yangtersedia	2		
			12) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang memanfaatkan Paket PerbekalanKesehatan	2		
			13) Jumlah Tenaga Kesehatan yang disediakan diRumah Singgah	10		
			14) Jumlah Pekerja Sosial Professional dan / atauTKS dan / atau Relawan Sosial yang disediakan	10		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			15) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah / Shelter dan / atau Pusat Kesejahteraan Sosial	6	Dinas Sosial	
			16) Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga dan Masyarakat	10		
			17) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan	10		
			18) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10		
			19) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	10		
			20) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	15		
			21) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	10		
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi KebutuhanDasarnya pada saat dan setelah TanggapDarurat Bencana Daerah Kabupaten	22) Jumlah Korban Bencana yang mendapatkanMakanan	357		
			23) Jumlah Korban Bencana yang menerima PaketSandang	357		
			24) Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yangdimiliki	357		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			25) Jumlah Paket Permakanan Khusus bagiKelompok Rentan	357	Dinas Sosial	
			26) Jumlah Korban Bencana yang menerimaPelayanan Dukungan Psikososial	357		
			27) Jumlah Pekerja Sosial Professional / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosialyang tersedia	58		
7.	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1) Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	SURAT KETERANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2) Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalamRencana Tenaga Kerja	SURAT KETERANGAN		
			3) Jumlah Perusahaan yang menyusun RencanaTenaga Kerja di Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
		Persentase Tenaga KerjaBersertifikat Kompetensi	4) Persentase Penerapan Program PBK denganKualifikasi Klaster	100 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			5) Persentase Instruktur bersertifikat Kompetensi	8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			6) Rasio Jumlah Instruktur terhadap PesertaPelatihan	13		
			7) Persentase LPK yang Terakreditasi	SURAT KETERANGAN		
			8) Persentase LPK yang memiliki Perizinan	SURAT KETERANGAN		
			9) Jumlah Penganggur yang dilatih	160		
			10) Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	160		
			11) Persentase Penyerapan Lulusan	160		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			12) Lulusan Bersertifikat Kompetensi	84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			13) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yangdiberikan Pelatihan	SURAT KETERANGAN		
			14) Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	SURAT KETERANGAN		
		Tingkat Produktivitas TenagaKerja	15) Persentase Perusahaan yang menerapkanProgram Peningkatan Produktivitas	SURAT KETERANGAN		
			16) Data Tingkat Produktivitas Total	SURAT KETERANGAN		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerjayang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17) Persentase Perusahaan yang telah memilikiPeraturan Perusahaan (PP)	88		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			18) Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	SURAT KETERANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			19) Rekapitulasi Tahunan Jumlah Konfederasi SP/SB yang tercatat, Federasi SP/SB yang Tercatat, SP/SB di Perusahaan yang Tercatat, SP/SB diluar Perusahaan yang tercatat dan Anggota SP/SB di Perusahaan	SURAT KETERANGAN		
			20) Persentase Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah	SURAT KETERANGAN		
			21) Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	88		
			22) Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			23) Jumlah Mogok Kerja	SURAT KETERANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			24) Jumlah Penutupan Perusahaan	SURAT KETERANGAN		
			25) Jumlah Perselisihan Kepentingan	SURAT KETERANGAN		
			26) Jumlah Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	SURAT KETERANGAN		
			27) Jumlah Perselisihan PHK	SURAT KETERANGAN		
			28) Jumlah Pekerja / Buruh yang ter-PHK	SURAT KETERANGAN		
			29) Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui Perundingan Bipartite	SURAT KETERANGAN		
			30) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten yang diberdayakan	SURAT KETERANGAN		
			31) Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	SURAT KETERANGAN		
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam Wilayah Kabupaten	32) Jumlah Lowongan Kerja yang tersedia di Wilayah Kabupaten	25		
			33) Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar di Kabupaten	264		
			34) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten	8		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
			35) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam Satu Kabupaten	SURAT KETERANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			36) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3		
			37) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar Kerja Lokal dalam Satu Wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			38) Jumlah Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			39) Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	SURAT KETERANGAN		
			40) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan Sosialisasi	SURAT KETERANGAN		
			41) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata	SURAT KETERANGAN		
			42) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan Fasilitas Kepulangan	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
.....			43) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	SURAT KETERANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			44) Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna danKeluarganya	SURAT KETERANGAN		
			45 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)yang dibentuk	SURAT KETERANGAN		
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	1) Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat DaerahKabupaten yang telah dilatih PUG	39 OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			2) Jumlah Program / Kegiatan PUG pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten	456 Sub Kegiatan		
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	3) Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Dinas PPPA) untuk melakukan KIEPencegahan Kekerasan terhadap Anak	1 Media Cetak		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			4) Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telahmemiliki Standar Pelayanan Minimal	1 Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			5) Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	100 %		
			6) Jumlah Lembaga Layanan anak yang mendapatPelatihan	1 Lembaga		
			7) Jumlah Lembaga Layanan anak yang mendapatkan Bantuan Keuangan / Fasilitas oleh Pemeritah Kabupaten (APBD Kabupaten)	SURAT KETERANGAN		
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO(Per 100.000 Penduduk Perempuan)	8) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten yang mendapatkan Pelatihan	20 Organisasi		
			9) Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupatenyang sudah dilatih	50 Orang		
			10) Jumlah Lembaga Layanan PemberdayaanPerempuan yang mendapat Pelatihan	20 Lembaga		
			11) Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten	2 organisasi		
			12) Jumlah Kebijakan / Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	3 Program		
			13) Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Hak Perempuan yang telah Terstandarisasi	1 Lembaga		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			14) Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	7		
9.	Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung sesuai Kebutuhan)	1) Tersedianya Infrastruktur Perumahan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	5	Dinas Ketahanan Pangan	
			2) Terselurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	11		
			3) Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	SURAT KETERANGAN		
			4) Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	1		
			5) Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1		
			6) Tertanganinya Kerawanan Pangan	1 Desa Kabiraan		
			7) Terselurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	1		
			8) Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
10.	Pertanahan	Persentase PemanfaatanTanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya diatas izin Lokasi dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang diterbitkan	1) SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	SURAT KETERANGAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada, karena OPD kami tidak melaksanakan kegiatan tersebut
			2) SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum / Absentee dan Daftar Subyek	SURAT KETERANGAN		
			3) SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah KelebihanMaksimum / Absentee	SURAT KETERANGAN		
			4) Dokumen Izin Membuka Tanah	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			5) Dokumen Perencanaan Penggunaan TanahKabupaten	SURAT KETERANGAN		
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH) Kabupaten	1) Hasil Perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) : 61,43 Indeks Kualitas Udara (IKU) : 88,16 Indeks Tutupan Hutan (ITH) :64,04 Nilai : 72,83	Dinas LingkunganHidup dan Kebersihan	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	2) Tersedianya Data dan Informasi PenangananSampah di Wilayah Kabupaten	Ada : 25.463,42 ton		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Ketaatan Penanggung Jawabusaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, IzinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	3) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten	9 Izin	Dinas LingkunganHidup dan Kebersihan	
			4) Rasio Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	1		
			5) Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yangberada di Daerah Kabupaten	9		
			6) Terasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan MasyarakatHukum Adat terkait PPLH	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			8) Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang ditangani	7		
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	1) Penerbitan Akta Perkawinan	56%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			2) Penerbitan Akta Perceraian	100%		
			3) Penerbitan Akta Kematian	64%		
			4) Penyajian Data Kependudukan	100%		
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1) Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam KerjaSama antar Desa	SURAT KETERANGAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			2) Jumlah Desa yang melakukan Kerja Sama antar Desa Tahun berjalan dikurangi Jumlah Desa yang melakukan Kerja Sama antar Desa Tahun Sebelumnya	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	3) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	SURAT KETERANGAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			4) Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	SURAT KETERANGAN		
			5) Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam KerjaSama antar Desa	SURAT KETERANGAN		
			6) Jumlah Desa yang melakukan Kerja Sama antar Desa Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Desa yang melakukan Kerja Sama antar Desa Tahun Sebelumnya	SURAT KETERANGAN		
			7) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	SURAT KETERANGAN		
			8 Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	SURAT KETERANGAN		
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1) Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perdakan	1 Dokumen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan(MUKP) seluruh Wanita umur 25-49 Tahun	20,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			3) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun(Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	— 37,3		
			4) Persentase Masyarakat yang terpapar Isi PesanProgram KKBPK (Advokasi dan KIE)	74,34 %		
			5) Jumlah Stake Holders / Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	8 Ormas dan 8 Mitra Kerja		
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	6) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yangsiap melayani KB MKJP	100 %		
			7) Persentase Peserta KB Aktif (PA) MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29,13%		
			8) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memilikiKelompok Kerja KKBPK yang Efektif	32 Pokja Kampung KB		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
		Persentase Kebutuhan ber-KByang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9) Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	33,04 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			10) Persentase kesertaan KB di Kabupaten denganKesertaan Rendah	Kec. Tubo Sendana 55,93%		
			11) Persentase Kesertaan KB Keluarga PenerimaBantuan Iuran (PBI)	17,07 %		
15.	Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	1) Persentase tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	66,67%	Dinas Perhubungan	
			2) Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			3) Penetapan Tarif Angkutan Orang antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi	60,00%	Dinas Perhubungan	
			4) Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	97,67 %		
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangterhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1) Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakanAkses Internet yang diamankan yang disediakanoleh Dinas Kominfo	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik danPersandian	
			2) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
			3) Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (Berdasarkan Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal lainnya) dengan memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	4) Persentase Kegiatan (Event), Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara Daring dengan memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100 %		
			5) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	45 %		
			6) Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	100 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
			7) Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam Dokumen Proses Bisnis yang telah Diimplementasikan secara Elektronik	0 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			8) Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik	14,2 %		
			9) Persentase Sistem Elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0 %		
			10) Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	92 %		
			11) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	37,5 %		
			12) Persentase Perangkat Daerah yang menyimpanData di Pusat Data Pemerintah	37,5 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
			13) Persentase Perangkat Daerah yang memperbaharui Datanya sesuai Siklus Jenis Data (Sesuai Renstra Kominfo)	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			14) Persentase Data yang dapat berbagi pakai	6		
			15) Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi Inovasi yang mendukung Smart City	SURAT KETERANGAN		
			16) Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	14,2%		
			17) Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-Government	Peraturan Bupati No 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan SPBE		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
		Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	18) Persentase Komunitas Masyarakat / Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			19) Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	Tabel Khusus		
			20) Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai denganStrategi Komunikasi (STARKOM) dan SOPyang telah ditetapkan	100%		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1) Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
			2) Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			3) Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	33%		
			4) Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			5) Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaandalam Daerah Kabupaten	32%		
			6) Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	3,27 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
			7) Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
			8) Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pembiayaan	Tidak Perlu Diisi		
			9) Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	100%		
			10) Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			11) Persentase yang diberikan dukungan Fasilitas Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			12) Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	50 %		
			13) Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha	14) Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yangBerskala Mikro	3,84 %	Dinas Koperasi, UKM, Perdaganganan Perindustrian	
			15) Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	108		
			16) Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	2		
			17) Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	12		
			18) Persentase Jumlah Usaha Mikro yang dberikandukungan Fasilitas Pemasaran	30		
			19) Rasio Usaha Mikro yang diberikan dukunganFasilitas Pelatihan	1180		
			20) Persentase Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan melalui Lembaga Pendampingan	10		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
18.	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	1) PERDA mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	SURAT KETERANGAN		
			3) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	SURAT KETERANGAN		
			4) Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One On One Meeting	SURAT KETERANGAN		
			5) Kegiatan Pameran Penanaman Modal	SURAT KETERANGAN		
			6) Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	SURAT KETERANGAN		
			7) Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	SURAT KETERANGAN		
			8) Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			9) Laporan Realisasi Penanaman Modal	SURAT KETERANGAN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			10) Pembinaan Aparatur Penanaman Modal TingkatKabupaten	SURAT KETERANGAN		
			11) Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	SURAT KETERANGAN		
			12) Tersedianya Data dan Informasi Perizinan danNon Peizinan Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat Partisipasi Pemudadalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1) Jumlah Pemuda yang mendapat PelatihanKewirausahaan	229	Dinas Pendidikan dan PemudaOlahraga	
			2) Jumlah Pemuda yang mendapat BantuanKewirausahaan	168		
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan OrganisasiSosial Kemasyarakatan	3) Jumlah Pemuda yang medapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dan Kepeloporan Pemuda	760		
			4) Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	4		
		Peningkatan Prestasi Olahraga	5) Jumlah Pelatih Olahraga yang memilikiKompetensi di Satuan-Satuan Pendidikan	9		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			6) Jumlah Penyelenggaraan Event OlahragaPrestasi Tingkat Daerah	3	Dinas Pendidikan dan PemudaOlahraga	
20.	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangmenggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah	1) Tersedianya Buku Profil Daerah	Ada (buku majene dalam angka)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik danPersandian	
			2) Jumlah Survey Statistik Sektoral yang dilakukan	SURAT KETERANGAN		
			3) Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yangdilakukan	SURAT KETERANGAN		
			4) Jumlah Survey Statistik Sektoral yang mendapat Rekomendasi BPS	SURAT KETERANGAN		
			5) Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yangmendapat Rekomendasi dari BPS	SURAT KETERANGAN		
			6) Persentase Kelengkapan Metadata KegiatanStatistik Sektoral	SURAT KETERANGAN		
			7) Persentase Kelengkapan Metadata VariabelSektoral	SURAT KETERANGAN		
21.	Persandian	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	1) Persentase Kegiatan Strategis yang telah diamankan melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal disbanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis yang harus diamankan	SURAT KETERANGAN	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik danPersandian	Sarana Dan Prasarana Tidak Mendukung Akibat Anggaran Yang Diberikan Tidak Mencukupi



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			2) Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan Prinsip Sistem Manajemen yangtelah menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian disbanding Jumlah Sistem Elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	SURAT KETERANGAN	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sarana Dan Prasarana Tidak Mendukung Akibat Anggaran Yang Diberikan Tidak Mencukupi
			3) Persentase Sistem Elektronik / Asset Informasi yang telah diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	SURAT KETERANGAN		
			4) Persentase Titik yang diamankan disbanding dengan Jumlah seluruh Titik pada Pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	1) Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi)	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			2) Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian, Penayaan Keberagaman)	10		
			3) Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	10		
			4) Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola)	SURAT KETERANGAN		
			5) Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengjasian, Penetapan, Pencatatan, Pemingkatan, Penghapusan)	5		
			6) Perlindungan Cagar Budaya Provinsi (Penyelamatan, Zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran)	15		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			7) Layanan Perijinan membawa Cagar Budaya Provinsi ke Luar Provinsi dengan Dukungan Data	SURAT KETERANGAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			8) Pengembangan Cagar Budaya Provinsi(Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi)	5		
			9) Pemanfaatan Cagar Budaya Provinsi (dalam hal Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan, dan Pariwisata)	2		
			10) Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangandan Pemanfaatan Koleksi Museum	1073		
			11) Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Museum	4		
			12) Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten	9		
			13) Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	8		
			14) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi	8		
			15) Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	7		
			16) Pemetaan SDM Cagar Budaya danPermuseum	14		
			17) Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budayadan Permuseum	14		
			18) Penyediaan Sarana dan Prasarana PendaftaranCagar Budaya dan Permuseum	3		
			19) Penyelenggaraan Kegiatan Museum yangMelibatkan Masyarakat	4		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
23.	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1) Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	0,125%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			2) Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	5,5%		
			3) Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	0,003%		
			4) Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	SURAT KETERANGAN		
			5) Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	791		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6) Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi / Dialih Media (Digitalisasi) / Terdaftar yang ada di Wilayahnya	SURAT KETERANGAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			7) Jumlah Naskah Kuno yang Dialih Aksara danDialih Bahasa	SURAT KETERANGAN		
			8) Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersimpan dan / atau Terdaftar yang ada di Wilayahnya (Item)	SURAT KETERANGAN		
24.	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1) Persentase Arsip Aktif yang telah dibuatkanDaftar Arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			2) Persentase Arsip in-AKTIF yang telah dibuatkanDaftar Arsip	SURAT KETERANGAN		
			3) Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkanSarana Bantu Temu Balik	SURAT KETERANGAN		
			4) Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkandalam SIKN melalui JIKN	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(5)	
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan berbAngsa dan Bernegara untuk Kepetingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	5) Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	SURAT KETERANGAN	Dinas Perputakaan dan Kearsipan	
			6) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip AkibatBencana yang sesuai NSPK	SURAT KETERANGAN		
			7) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan / Kelurahanyang sesuai NSPK di Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			8) Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil AlihMedia yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten yang sesuai NSPK	SURAT KETERANGAN		
			9) Pencarian Arsip Statis yang Pengelolaannya menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk Daftar Pencarian Arsip yang sesuai NSPK	SURAT KETERANGAN		
			10) Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang sesuai NSPK	SURAT KETERANGAN		
URUSAN PILIHAN						
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	1) Jumlah Rumah Tangga Nelayan yangmelakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	4.244 RTP	Dinas Kelautan dan Perikanan	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
			2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yangOperasional	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan	SURAT KETERANGAN		
			4) Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan / Penyuluhan dan Pendampingan / Kemitraan Usaha / Kemudahan Akses Iptek dan Informasi / dan Penguatan Kelembagaan)	12 Kelompok		
			5) Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan AirPayau yang di Produksi	276.000 Ekor		
26.	Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	1) Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			2) Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar,Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	17		
			3) Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Per Sub Jenis Usaha di Kabupaten	80		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
			4) Jumlah Wisatawan Mancanegara PerKebangsaan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			5) Jumlah Promosi Event Daerah yang terlaksanadi Dalam Negeri	9		
			6) Jumlah Event Luar Negeri yang diikutiKabupaten	SURAT KETERANGAN		
			7) Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	6		
			8) Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi	4		
			9) Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataaan	100%		
			10) Jumlah Lokasi Yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat Dan PembinaanKemitraan Usaha Masyarakat	10		
27.	Pertanian	Produktivitas Pertanian perHektar per Tahun	1) Jumlah Sarana dan Prasana Pertanian yangdiberikan	Sarana : - 2 (APBN) - 1 (APBD) Prasarana : - 2 (APBD)		
			2) Prasaran Pertanian yang digunakan	2 Unit		
			3) Penerbitan Izin Usaha Pertanian	10 Rekomendasi Izin Usaha Peternakan		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah KasusPenyakit Hewan Menular	4) Persentase Prasarana yang digunakan	100 %	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
			5) Persentase Jumlah Usulan Izin UsahaPertanian Kabupaten	100 %		
			6) Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	0,284 %		
28.	Kehutanan		1) Tersedianya Dokumen Rencana PengelolaanTahura	NIHIL	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
			2) Pemberdayaan Masyarakat di DaerahPenyangga			
			3) Pemulihan Ekosistem pada Tahura			
			4) Menurunnya Gangguan Kawasan Tahura			
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Ijin di Kabupaten	1) Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten		Bagian Sumber Daya AlamSetda	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
30.	Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1) Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuaidengan ketentuan untuk Izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	SURAT KETERANGAN	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
				SURAT KETERANGAN		
			2) Persentase Penerbitan TDG	SURAT KETERANGAN		
			3) Persentase Gudang yang tidak mempunyaiTDG	SURAT KETERANGAN		
			4) Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktuuntuk : a. Penerima Waralaba dari Waralaba dalamNegeri b. Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralabadalam Negeri	SURAT KETERANGAN		
				SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
			c. Penerima Waralaba Lanjutan dari WaralabaLuar Negeri	SURAT KETERANGAN	Dinas Koperasi,UKM, Perdaganganan Perindustrian	
			5) Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
			6) Persentase Penerbitan SPKA yang tepat waktu	SURAT KETERANGAN		
			7) Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	SURAT KETERANGAN		
			8) Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	9) Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	SURAT KETERANGAN	Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase Alat-Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkap annya (UTTP)Bertanda Tera Sah yang berlaku	10) Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera / tera Ulang dalam Tahun berjalan	SURAT KETERANGAN		
			11) Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasiterhadap Ketentuan yang berlaku	27,7%		
31.	Perindustrian	Pertambahan Jumlah IndustriKecil dan Menengah di Kabupaten	1) Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	2) Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	30 %	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	3) Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan	SURAT KETERANGAN		
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	4) Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang diterbitkan	SURAT KETERANGAN		
		Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	5) Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Output)	Capaian Kinerja	SumberData	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
32.	Transmigrasi		1) Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasiPenetapannya	SURAT KETERANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2) Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi Pembangunannya	SURAT KETERANGAN		
			3) Jumlah Satuan Pemukiman yang dibina	SURAT KETERANGAN		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1.	Pendidikan	1) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Anak Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD x 100 % Jumlah Anak Usia 5 - 6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	5940 ----- x 100 % = 51,36 % 11.564	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	
		2) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7 - 12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar x 100 % Jumlah Anak Usia 7 - 12 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	22.357 ----- x 100 % = 100,15 % 22.322		
		3) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama x 100 % Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun pada Provinsi Bersangkutan	7.917 ----- x 100 % = 69,49% 11.393		
		4) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Anak Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan x 100 % Jumlah Anak Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	836 ----- x 100 % = 100 % 836		
2.	Kesehatan	5) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten	181 ----- x 100 % = 0,98 % 184.664	Dinas Kesehatan	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6) Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten	1 ---- x 100 % = 100 % 1	Dinas Kesehatan	
		7) Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan ----- x 100 % Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten	2.412 ----- x 100 % = 70,05 % 3.443		
		8) Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan ----- x 100 % Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten	3.304 ----- x 100 % = 95,82 % 3.448		
		9) Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten	3.304 ----- x 100 % = 96,38 % 3.428		
		10) Presentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Balita di Kabupaten	8.966 ----- x 100 % = 64,41 % 13.919		
		11) Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten	27.795 ----- x 100 % = 82,44 % 33.715		
		12) Persentase Orang Usia 15 - 29 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Orang Usia 15 - 59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Orang Usia 15 - 59 Tahun di Kabupaten	65.001 ----- x 100 % = 60,27 % 107.843		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		13) Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Orang Warga Negara Usia 60 Tahun di Kabupaten	9.026 ----- x 100 % = 63,01 % 14.324	Dinas Kesehatan	
		14) Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Penderita Hipertensi di Kabupaten	4.984 ----- x 100 % = 51,34 % 9.706		
		15) Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Penderita DM di Kabupaten	1.078 ----- x 100 % = 100 % 1.078		
		16) Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	Jumlah Penderita ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Penderita ODGJ di Kabupaten	327 ----- x 100 % = 92,89% 352		
		17) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	Jumlah Penderita TBC yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Penderita TBC di Kabupaten	3.386 ----- x 100 % = 100 % 3.386		
		18) Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV di Kabupaten	3.940 ----- x 100 % = 81,91 % 4.810		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19) Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten (Ha) ----- x 100 % Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kabupaten (Ha)	62,09 ----- x 100 % = 25,57 % 242,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		20) Rasio Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ----- x 100 % Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	74,21 ----- x 100 % = 63,53 % 116,81		
		21) Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi yang dibangun (Ha), ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), dioperasikan danelihara (Ha) di Tahun Eksisting ----- x 100 % Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	1064 ----- x 100 % = 69,36 % 1534		
		22) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten ----- x 100 % Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga diseluruh Kabupaten tersebut	35.803 ----- x 100 % = 68,35 % 52.380		
		23) Persentase Jumlah Rumah yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah yang memiliki Akses Pengolahan berupa Cubluk + Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah Rumah yang memiliki sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah Rumah di Kabupaten	37.268 ----- x 100% = 71,14% 52.380		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		24) Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku	5.538 ----- x 100 % = 52,60 % 10.527	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		25) Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ----- x 100 % Panjang Jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten	275.353 ----- x 100 % = 44,04 % 625.212		
		26) Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis / Analis ----- x 100 % Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis / Analis di wilayah Kabupaten	SURAT KETERANGAN		Tidak ada Bidang yang menangani Jasa Konstruksi
		27) Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa kecelakaan Konstruksi	Jumlah Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya yang terjadi Kecelakaan Konstruksi ----- x 100 % Jumlah Total Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya	SURAT KETERANGAN		Tidak ada Bidang yang menangani Jasa Konstruksi
4.	Perumahan Rakyat	28) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n ----- x 100 % Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	SURAT KETERANGAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data, karena OPD tidak melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kab.



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		29) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah Total Rumah Tangga terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi Kriteria Penerima pelayanan	SURAT KETERANGAN		Tidak Ada Data, karena OPD tidak melaksanakan kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab.
		30) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) ----- x 100 % Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1,6 Ha ----- x 100 % = 20 % 8,00 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		31) Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni ----- x 100 % Jumlah Total Unit Rumah di Kabupaten	12.833 ----- x 100 % = 32,42 % 39.583		
		32) Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah Unit Rumah Kabupaten	1.958 ----- x 100 % = 4,9 % 39.583		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk	8 ----- x 100 % = 100 % 8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		34) Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Jumlah Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang memuat Sanksi yang ditegakkan ----- x 100 % Jumlah Keseluruhan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang memuat Sanksi	41 ----- x 100 % = 100,00 % 41		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		35) Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana x 100 % Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	177.390 ----- x 100 % = 100 % 177.390	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		36) Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	177.390 ----- x 100 % = 100 % 177.390		
		37) Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	10 ----- x 100 % = 83.33 % 12		
		38) Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten dalam Tingkat Waktu Tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah Jumlah Layanan Pemadaman di Kabupaten dalam Tingkat Waktu Tanggap oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah x 100 % Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten	30 ----- x 100 % = 100 % 30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		39) Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Rata-Rata Waktu Tanggap, dihitung dari Pelaporan, Penyiapan Tim dan Peralatan, Jarak Tempuh dan Kesiapan Pemadaman Kebakaran	12 Menit		
6.	Sosial	40) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti x 100 % Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	404 ----- x 100 % = 100 % 404	Dinas Sosial	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		41) Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam Satu Tahun Anggaran ----- x 100 % Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	120 ----- x 100 % = 100 % 120	Dinas Sosial	
7.	Tenaga Kerja	42) Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100 % Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	SURAT KETERANGAN		
		43) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan	160 ----- x 100 % = 7,2 % 2.207	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		44) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB Tahun Berjalan (Atas Dasar Harga Konstan) ----- x 100 % Jumlah Tenaga Kerja	5.536,78 ----- x 100 % = 250,87 % 2.207		
		45) Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak ----- x 100 % Jumlah Perusahaan	98 ----- x 100 % = 24,43 % 401		
		46) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam Wilayah Kabupaten	Jumlah Pencaker (Pencari Kerja) yang ditempatkan ----- x 100 % Jumlah Pencaker yang terdaftar	180 ----- x 100 % = 36,43 % 494		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	47) Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh Belanja Langsung APBD}} \times 100 \%$	$\frac{171.062.554.633}{391.461.206.956} \times 100 \% = 43.69\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		48) Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Anak (Penduduk Usia kurang dari 18 Tahun) Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 Tahun)}} \times 100 \%$	$\frac{30}{30} \times 100 \% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		49) Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100 \%$	$\frac{26}{92.605} \times 100 \% = 28,07\%$		
9.	Pangan	50) Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras / Jagung sesuai Kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan}} \times 100 \%$	$\frac{36.994,36}{20.855,68} \times 100 \% = 177.382\%$	Dinas Ketahanan Pangan	
10.	Pertanahan	51) Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanahnya diatas izin Lokasi dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100 \%$	SURAT KETERANGAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data, karena OPD tidak melaksanakan kegiatan tersebut
		52) Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum}} \times 100 \%$	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		53) Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100 % Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	SURAT KETERANGAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tidak Ada Data, karena OPD tidak melaksanakan kegiatan tersebut
		54) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Penerima Tanah Obyek Landreform dengan Luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha ----- x 100 % Jumlah Penerima Tanah Obyek Landreform	SURAT KETERANGAN		
		55) Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100 % Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	SURAT KETERANGAN		
		56) Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan	SURAT KETERANGAN		
11.	Lingkungan Hidup	57) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	Indeks Kualitas Air (IKA) : 66,0 Indeks Kualitas Udara (IKU) : 88,95 Indeks Tutupan Hutan (ITH) : 65,03 Nilai : 75,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		58) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Total Volume Sampah yang dapat ditangani ----- x 100 % Total Volume Timbunan Sampah Kabupaten	8.451,78 ----- x 100 % = 32,63% 25.898,94		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		59) Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar terhadap Izin Lingkungan, dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten\	0 ----- x 100 % = 0 % 9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Surat keterangan bahwa kegiatan pengukuran tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH belum dilaksanakan
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60) Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el yang telah melakukan Perekaman ----- x 100 % Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	121.141 ----- x 100 % = 98,25 % 123.298	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		61) Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun kurang 1 (satu) Hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100 % Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun	25.333 ----- x 100 % = 41,28 % 61.365		
		62) Persentase Anak Usia 0 - 18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Anak Usia 0 - 18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran ----- x 100 % Jumlah Anak Usia 0 - 18 Tahun	60.200 ----- x 100 % = 94,22 % 63.891		
		63) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ----- x 100 % Jumlah OPD	2 ----- x 100 % = 5 % 40		Tidak adanya Kerjasama dengan OPD lain dalam Pemanfaatan Data pada Tahun 2021



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang per Tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per Tahun x 100 % Jumlah Desa Tertinggal (per - Awal Tahun n)	12 ----- x 100 % = 66,66 % 18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		65) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa Berkembang yang memenuhi Kriteria Desa Mandiri per Tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per Tahun x 100 % Jumlah Desa Berkembang (per - Awal Tahun n)	11 ----- x 100 % = 25 % 44		
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66) TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur <i>i</i> b_i = Jumlah Kelahiran dari Perempuan pada Kelompok Umur pada Tahun tertentu p_i = Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur <i>i</i> pada Pertengahan Tahun yang sama i = Kelompok Umur (<i>i</i> = 1 untuk Kelompok Umur 15-19, 1 = 2 untuk Kelompok Umur 20-24 , , <i>i</i> = 7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1.000	2,53	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		67) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Jumlah Peserta KB Aktif Modern x 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur	15.945 ----- x 100 % = 61,59 % 25.885		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		68) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$	3.588 ----- x 100 % = 13,86 % 25.885	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15.	Perhubungan	69) Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) o IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten x Bobot Trayek) dibagi Jumlah Kebutuhan Trayek pada Kabupaten tersebut o IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = jumlah Lintas Penyeberangan yang Beroperasi pada Kabupaten tersebut x Bobot Lintas) dibagi (Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan pada Kabupaten tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu	100 % Jumlah Trayek = 6 Capaian = 0,8	Dinas Perhubungan	Tidak Tersedia Data



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) - Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP =0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi(>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensisedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensirendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5		Dinas Perhubungan	
		70) Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,66		Tidak Tersedia Data
16.	Komunikasi dan Informatika	71) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100 \%$	32 ----- x 100 % = 82,5 % 40	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Surat Keterangan
		72) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100 \%$	15 ----- x 100 % = 83,33 % 18		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		73) Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten x 100 % Jumlah Penduduk	155.144 ----- x 100 % = 84,01 % 184.664	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74) Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset x 100 % Jumlah Seluruh Koperasi	19 ----- x 100 % = 16,96 % 112	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
		75) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha x 100 % Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan	2.068 ----- x 100 % = 11,46 % 18.032		
18.	Penanaman Modal	76) Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	(Jumlah Investasi Tahun n - Jumlah Investasi Tahun n -1) di Kabupaten x 100 % Jumlah Investasi Tahun n-1 di Kabupaten	118.801.479.359 -----x 100 %= 148,871,72 % 79.801.490.698	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	77) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda (Umur 16 - 30 Tahun) yang Berwirausaha di Kabupaten x 100 % Jumlah Pemuda (Umur 16 - 30 tahun) di Kabupaten	450 ----- x 100 % =0,98% 45835	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	
		78) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda (Umur 16-30 Tahun) yang menjadi Anggota Aktif pada Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten x 100 % Jumlah Pemuda (Umur 16-30 Tahun) di Kabupaten	16 ----- x 100 % =0,03% 45835		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		79) Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	SURAT KETERANGAN	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	
20.	Statistik	80) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100 \%$	$\frac{40}{40} \times 100 \% = 100 \%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		81) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100 \%$	$\frac{40}{40} \times 100 \% = 100 \%$		
21.	Persandian	82) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Nilai per Area Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah Area Penilaian}} \times 100 \%$	SURAT KETERANGAN	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
22.	Kebudayaan	83) Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100 \%$	$\frac{5}{214} \times 100 \% = 2,33 \%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
23.	Perpustakaan	84) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang diukur menggunakan Survei / Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat	8.570	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		85) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan Metode Sensus dengan mengukur Sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan Koleksi UPLM 3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan UPLM 4 = Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{\sum ELM} \times 100$	15,68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Kearsipan	86) Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = \frac{(a + j + s + i)}{4}$ Keterangan : T = Tingkat Ketersediaan Arsip a = Persentase Arsip Aktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip i = Persentase Arsip Inaktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip s = Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik j = Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$T = \frac{(282 + 25.139 + 1570 + 0)}{4}$ T = 6.748	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		87) Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	$T = \frac{(m + b + g + a + c + i)}{6}$	SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Keterangan : T = Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban m = Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK b = Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK g = Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK a = Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK c = Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK i = Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup dengan NSPK			
URUSAN PILIHAN						
25.	Kelautan dan Perikanan	88) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten ----- x 100 % Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	9.435 ----- x 100 % = 86,23 % 10.941	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26.	Pariwisata	89) Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	(Jumlah Wisatawan Tahun n - Jumlah Wisatawan Tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	0 ----- x 100 % = 0 % 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		90) Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah Wisatawan Tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100 \%$	-64.902 ----- x 100 % = -135.35 % 47.951	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		91) Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{\text{Jumlah Kamar yang terjual}}{\text{Jumlah Kamar yang tersedia}} \times 100 \%$	1.183 ----- x 100 % = 1,05 % 112.420		
		92) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Belaku	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB Harga Berlaku}} \times 100 \%$	3.685.149,31 ----- x 100 % = 66,55 % 5.536.835,79		
		93) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	$\frac{\text{Jumlah realiasi PAD Dari Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah Total PAD}} \times 100 \%$	178.565.400 ----- x 100 % = 1,64 % 10.834.056.486,61		
27.	Pertanian	94) Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	$\frac{\text{Jumlah Produksi Pertanian Pangan per Hektar per Tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100 \%$	28.103 Ton ----- x 100 % = 545,58 % 5.151 Ha	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
		95) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Penyakit / Kasus Tahun Berjalan (t) - Jumlah Kejadian / Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah Kejadian / Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun Sebelumnya (t-1)}} \times 100 \%$	6.385 ----- x 100 % = 469.48 % 1.360		
28.	Kehutanan	Tidak Ada		SURAT KETERANGAN		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	96) Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Ijin di Kabupaten	Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Ijin x 100 % Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi	SURAT KETERANGAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
30.	Perdagangan	97) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Memiliki Izin sesuai Ketentuan x 100 % Jumlah Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten	33 ----- x 100 % = 5,89 % 560	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
		98) Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Realisasi Pupuk x 100 % RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	811.800 ----- x 100 % = 100% 811.800		
		99) Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkap annya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada Tahun berjalan x 100 % Jumlah Potensi UTTP yang Wajib Ditera dan Tera Ulang diwilayah Kabupaten	25 ----- x 100 % = 1,23 % 2.022		
31.	Perindustrian	100) Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n - Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n-1) x 100 % Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n-1	70 ----- x 100 % = 9,32 % 751	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
		101) Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK maka Nilai masing-masing Bobot Indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing Penilaian Indikator adalah Persentase Capaian Indikator dibagi Target dikali (100/N)% Nilai Akhir adalah Akumulasi dari N Indikator tersebut	30 %		



	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		102) Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam Laporan Hasil Pemantauan}}{\text{Jumlah Izin yang dikeluarkan}} \times 100 \%$	SURAT KETERANGAN	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
		103) Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam Laporan Hasil Pemantauan}}{\text{Jumlah Izin yang dikeluarkan}} \times 100 \%$	SURAT KETERANGAN		
		104) Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Izin yang dipantau dan dianalisis dalam Laporan Hasil Pemantauan}}{\text{Jumlah Izin yang dikeluarkan}} \times 100 \%$	SURAT KETERANGAN		
		105) Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	95%		
32.	Transmigrasi	Tidak Ada		3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perencanaan dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan x 100 % Jumlah APBD	119.809.450.897 ----- x 100 % = 13,92 % 860.469.922.264	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		2) Rasio PAD	Jumlah PAD ----- x 100 % Jumlah Pendapatan pada APBD	140.838.163.462 ----- x 100 % = 15,03 % 936.856.357.462	Badan Pendapatan Daerah	
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Mencapai Maturitas SPIP LEVEL 3	Inspektorat	
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Kapabilitas APIP Level 3		
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Umum - Transfer Expenditures x 100 % Jumlah Belanja APBD	643.878.727.855 ----- x 100 % = 68,29 % 942.811.788.997	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		6) Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP		
2.	Pengadaan	7) Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada Kuartal Pertama	Jumlah Kontrak Infrastruktur dengan Nilai Besar yang perlu Pembangunan dalam 3 Kuartal yang ditandatangani pada Kuartal Pertama Tahun n x 100 % Jumlah Kontrak Keseluruhan Tahun n	Surat keterangan tidak ada kontrak paket pekerjaan yang bernilai besar diatas 50 M 0 ----- x 100 % = 0,00 % 61	Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	



	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		8) Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif ----- x 100 % Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa Metode Kompetitif	61 ----- x 100 % = 10,14 % 601	Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	
		9) Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	Jumlah Nilai Belanja Langsung yang melalui Pengadaan ----- x 100 % Total Belanja Langsung	105.274.474.014 ----- x 100 % = 12,74 % 826.179.546.794		
3.	Kepegawaian	10) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT keatas ----- x 100 % Seluruh Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA kebawah	1.751 ----- x 100 % = 78,98 % 2.217	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	
		11) Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) ----- x 100 % Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	2.094 ----- x 100 % = 46,66 % 4.487		
		12) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi ----- x 100 % Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	443 ----- x 100 % = 21,15 % 2.094		
4.	Manajemen Keuangan	13) Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	Realisasi Belanja ----- x 100 % Total Belanja APBD	860.469.922.264 ----- x 100 % = 8,73 % 942.811.788.997	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		14) Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi ----- x 100 % Total PAD dalam APBD	86.869.885.155,62 ----- x 100 % = 38,44 % 140.838.163.462		



	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		15) Assets Management	1. Apakah ada Daftar Asset Tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada Manual untuk menyusun Daftar Asset Tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada Proses Inventarisasi Asset Tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah Nilai Asset Tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya 100 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		16) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	Nilai Realisasi <i>SiLPA</i> x 100 % Total Belanja Anggaran Tahun sebelumnya	2.646.093.812,38 x 100 % = 0,30 % 857.872.377.782,25		
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	17) Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia untuk Pelayanan	Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di Website Pemda x 100 % Realisasi Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di Website Pemda	860.469.922.264 x 100 % = 91,26% 942.811.788.997	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Surat Keterangan Tidak Ada Belanja Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Unit Pelayanan yang dapat diakses diwebsite Pemda
		18) Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen yang dipublikasikan di Website Pemda x 100 % Total Jumlah Dokumen yang telah dirinci	85 x 100 % = 108,97 % 78		



2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Misi	Tujuan	Indikator	Target 2023
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	68,53 %
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	65 (B)
Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan	Pendapatan Perkapita	28,62 Juta
Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat	Indeks Kesalihan Sosial	70 %

Sumber : Data Bagian Ortala Setda Kab. Majene Tahun 2023



Tabel 2.3. Target Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah DaerahKabupaten Majene dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023	
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif					
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Layanan pendidikan	1 .	Rata-Rata Lama Sekolah	9,21 Tahun	
		2 .	Harapan Lama Sekolah	14,26 Tahun	
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1 .	Angka Harapan Hidup	62,23	Tahun
		2 .	Prevalensi Stunting	23,85	%
3.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	1 .	Indeks Pembangunan Gender	94,19	%
		2 .	Indeks Perlindungan Anak	70,5	%
4.	Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	1 .	Persentase Penduduk Miskin	12,00	%
		2 .	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,70	%
		3.	Gini Ratio	0,336	%
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel					
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1.	Poin Predikat SAKIP	BB	Predikat
		2.	Opini BPK	WTP	Predikat
		3.	Nilai LPPD	3,57	
6.	Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	(Baik)
7.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	2.	Tingkat maturitas SPBE	3,0	(Baik)
8.	Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	1.	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	70,00	%
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan					
9.	Meningkatnya kontribusi Pengelolaan SDA dalam Perekonomian Daerah	1 .	Pertumbuhan Ekonomi		5,5 %-5,26%
		2.	Laju Inflasi (yoy)	2,09	%
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	73,20	%
11.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,41	%
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis					
12.	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	1.	Angka Kriminalitas	220 Kasus	

Sumber : Data Bagian Ortala Setda Kab. Majene Tahun 2023

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Adapun Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Misi	Tujuan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	68,53 %	72,44 %	100,5 %
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	65, (B)	50,91 (CC)	78,32 %
Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan	Pendapatan Perkapita	28,62 %	32,91,%	114,49 %
Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat	Indeks Kesalihan Sosial	70 %		

Sumber : Data Bagian Ortala Setda Kab. Majene Tahun 2023

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif							
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Layanan pendidikan	1 .	Rata-Rata Sekolah	Lama	9,21 Tahun	9,28 %	100,76 %
		2 .	Harapan Sekolah	Lama	14,26 Tahun	13,71 %	96,14 %
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1 .	Angka Harapan Hidup		62,23 Tahun	62,56 %	100,53 %
		2 .	Prevalensi Stunting		23,08 %	34,56 %	149,74 %
3.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	1 .	Indeks Pembangunan Gender		95 , 1 %	94,19 %	99,04 %
		2 .	Indeks Perlindungan Anak		70,5 %	52,70 %	74,75 %
4.	Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	1 .	Persentase Penduduk Miskin		12 %	14,54 %	Belum Mencapai Target
		2 .	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		2,70 %	2,64 %	
		3.	Gini Ratio		0,336 %	0,34 %	98,81 %
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel							
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1.	Poin Predikat SAKIP		BB	B	88 %
		2.	Opini BPK		WTP	WTP	100,00
		3.	Nilai LPPD		3,57	2,31	64,70



						%
6.	Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 (Baik)	84,60	103,17 & %
7.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	2.	Tingkat maturitas SPBE	3 (Baik)	2,56 (Cukup)	85,33 %
8.	Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	1.	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	70	100 %	142,85 %
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan						
9.	Meningkatnya kontribusi Pengelolaan SDA dalam Perekonomian Daerah	1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,5 % - 6,25 %	5,28	Belum Mencapai Target
		2.	Laju Inflasi (yoy)	2,09 %	2,59 %	Belum Mencapa i Target
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	73,2 %		
11.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,41 %	75,08 %	106,63 %
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis						
12.	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara		Angka Kriminalitas	220 Kasus	196 Kasus	110,91 %

Sumber : Data Bagian Ortala Setda Kab. Majene Tahun 2023

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Adapun Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten MajeneTahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	9,00	8.91	99,00%	9,04	9,10	100,66 %	9,21 Tahun	9,28	100,76 %
2.	Harapan Lama Sekolah	Persen	15,19	13.62	89,66%	14,13	13,63	96,46 %	14,26 Tahun	13,71 Tahun	96,14 %
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	61,96	61.77	99,69%	62,01	62,16	100,24 %	62,23	62,56	100,53 %
4.	Prevalensi Stunting	Persen	30,28	32,30	106,67	27,27	31,08	113,97 %	23,08	34, 56	149,74 %
5.	Indeks Pembangunan Gender	Persen	94,72	95	100,29	95	94,19 %	99,15 %	95,1	94,19	99,04 %
6.	Indeks Perlindungan Anak	Persen	67,51	68,51	101,48	68,25	69,87 %	102,37 %	70,5	52,70 %	74,75 %
7.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,18	14,19	107,66	12,41	15,13	121,91 %	12	14 ,5 4 %	Belum Mencapai Target
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	4,36	2.85	104,40%	4,15	2,19	52,77 %	2,70 %	2,64	Melebihi Target
9	Gini Ratio	Persen	0,351	0,341	97,15	0,343	0,377	110,88 %	0,336	0,34	98,81 %
10.	Poin Predikat SAKIP	Predikat	A	B	80%	B	B	100,00	BB	B	88 %
11	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100 %



12	Nilai LPPD	Persen	3,60	3,51	97,50%	3,55	3,55	100,00	3,57	2,31	64,74 %
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	90	77	85,56%	80	WTP	100,00	82,00	84,60	100,3 %
14	Tingkat maturitas SPBE	Predikat	2,0	2,4	1,2	2,5	2,58	103,2	3	2,56	85,33 %
15	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	Persen	40	52	1,3 %	55,0	40	80	70	100	142,85 %
16.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,16	2.16	30,17%	6,16	-1,38	-22,40 %	5,5% - 6,25%	5,28	Belum Mencapai Target
17	Laju Inflasi (yoy)	Persen	2,28	3,95	173,25%	2,24	3,22 %	143,75 %	2,09	2,59	Belum Mencapai Target
18.	Indeks Infrastruktur Wilayah	Persen	100	100	100,00%	71,60 %	70 %	97,77 %	73,2	56,72	77,48 %
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	66,12	72.83	110,15%	69,96 %	72.83	104,10 %	70,41	75,08	106,63 %
20	Angka Kriminalitas	Kasus	150	187	75,33%	230	189	82,17 %	220	196	Melebihi Target

Sumber : Data Bagian Ortala Setda Kab. Majene Tahun 2023

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Adapun Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7. Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022

Indikator Makro	Nasional			Kabupaten Majene		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,6	- 2,42	-44,40 %	6,16	-1,38	-22,40 %
Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	72,31	72,29	99,97 %	80	67,29	84,11 %
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,5 - 9,5	9,8	91,11 %	12,41	15,13	121,91 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 - 5,2	6,49	71,20 %	4,15	2,19	52,77 %

Sumber : Data Bagian Ortala Setda Kab. Majene Tahun 2023

2.3.5. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Penanggung Jawab	Ket
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif					
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	45.422.443.341,-	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	Terlaksana
		Program Pengembangan Kurikulum	360.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	Terlaksana
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	59,997,700,-	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	Terlaksana
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.594.385.129,-	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	Terlaksana
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	3,531,289,400,-	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	Terlaksana
		Program Pengembangan Kapasitas Kpramukaan	6.291.200.000,-	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga	Terlaksana
		Program Pembinaan Perpustakaan	422.834.850,-	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terlaksana
		Program Pengelolaan Arsip	7.887.500,-	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terlaksana
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	430.250.00,-	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terlaksana
Subtotal Sasaran			55.098.750.820,-		
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.159.788.876.00 -	Dinas Kesehatan	Terlaksana
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.102.000.000.00,-	Dinas Kesehatan	Terlaksana
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	260.448.000.00,-	Dinas Kesehatan	Terlaksana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	704.128.300.00,-	Dinas Kesehatan	Terlaksana
		Program Pengendalian Penduduk	178.200.000.00,-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.889.633.000.00,-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.199.100.000.00,-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksana



Subtotal Sasaran			39.453.298.176.00,-		
3.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.283.900.000.00,-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksana
		Program Perlindungan Perempuan	1.283.900.000.00,-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	300.000.000,-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	21,342,572,-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	300.000.000,-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksana
		Program Perlindungan Khusus Anak	493.360.000,-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksana
Subtotal Sasaran			3.661.610.000.00,-		
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.675.000,-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terlaksana
		Program Penempatan Tenaga Kerja	710.558.600,-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terlaksana
		Program Hubungan Industrial	2.600.41.6,-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terlaksana
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	41.670.000,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	529,076,749,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana
		Program Pemberdayaan Sosial	55.200.000,-	Dinas Sosial	Terlaksana
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	147,581,554,-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksana
		Program Peningkatan Kerja sama Desa	4.858.500,-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksana
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	14.389.500,-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksana
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3,000,000,-	Dinas Sosial	Terlaksana
		Program Rehabilitasi Sosial	15.000.000,-	Dinas Sosial	Terlaksana
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	165.800.000,-	Dinas Sosial	Terlaksana
		Program Penanganan Bencana	33.400.000,-	Dinas Sosial	Terlaksana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.400.000,-	Dinas Sosial	Terlaksana
Subtotal Sasaran			363.393.000.00,-		



Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel					
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.946.273.648	Seluruh OPD	Terlaksana
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.165.078.315,-	Sekretariat Daerah	Terlaksana
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	2.991.525.000,-	Sekretariat DPRD	Terlaksana
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	176.758.450,-	Badan Perencanaan Daerah	Terlaksana
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.475.000,-	Badan Perencanaan Daerah	Terlaksana
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	372.320.855,-	Inspektorat Daerah	Terlaksana
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	304.175.000,-	Inspektorat Daerah	Terlaksana
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.118.117.157	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksana
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	330.642.643,-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksana
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	447.250.584,-	Badan Pendapatan Daerah	Terlaksana
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,284,718,000,-	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksana
Subtotal Sasaran			13.863.616.652.00,-		
6.	Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16.900.000,-	Kecamatan	Terlaksana
		Program Pendaftaran Penduduk	480.412.500,-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksana
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25,000,102,-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksana
		Program Pencatatan Sipil	30,429,582,-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksana
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	190,409,286,-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksana
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.907.532.556,-	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian	Terlaksana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000,-	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Terlaksana
		Program Penanggulangan Bencana	1.300.000.000,-	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Terlaksana
		Program Pelayanan Penanaman Modal	2.840.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksana
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	465.438.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksana



		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.550.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksana
		Program Kepegawaian Daerah	1.062.525.768,-	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	329.312.000,-	Kecamatan	Terlaksana
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.120.000,-	Kecamatan	Terlaksana
Subtotal Sasaran			5.685.630.824,-		
7.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.523.397,-	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian	Terlaksana
		Program Aplikasi Informatika	1,141,144,092,-	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian	Terlaksana
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.141.000,-	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian	Terlaksana
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	500.000,-	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian	Terlaksana
Subtotal Sasaran			1,177.308.489,-		
8.	Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.239.32065,-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Terlaksana
Subtotal Sasaran			9.239.32065,-		
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan					
9.	Meningkatnya kontribusi Pengelolaan SDA dalam Perekonomian Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	19.198.661,-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksana
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14,130,670,217,-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksana
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.762.043.500,-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terlaksana
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12,158,800,-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terlaksana
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	51.869.000,-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terlaksana
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	365.641.100,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksana
		Program Pemasaran Pariwisata	65.427.072,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksana
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	149.395.000,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana



		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4.939.000.000,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	9.920.200,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	307.020.000,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	20.098.000,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana	
		Program Pengembangan Ekspor	60,000,000,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	12.964.925,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.5216.00,-	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Terlaksana	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	655.000.000,-	Sekretariat Daerah	Terlaksana	
		Program Promosi Penanaman Modal	66.662.000,-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksana	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	56.520.000,-	Dinas Ketahanan Pangan	Terlaksana	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	30,085,068,-	Dinas Ketahanan Pangan	Terlaksana	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.190.000,-	Dinas Ketahanan Pangan	Terlaksana	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	758.750.115,-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksana	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	382.879.605,-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksana	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	1.440.000,-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksana	
			Program Penyuluhan Pertanian	95.694.272,-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Terlaksana
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	28.939.600,-	Dinas Perhubungan	Terlaksana
Subtotal Sasaran			27.880.323.267,-			
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	758.750.115,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksana	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	382.879.605,-	Dinas Pekerjaan Umum dan	Terlaksana	



		Penyediaan Air Minum		Penataan Ruang	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.440.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksana
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	95.694.272,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksana
		Program Pengembangan Permukiman	28.939.600,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksana
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	758.750.115,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksana
		Program Penataan Bangunan Gedung	382.879.605,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksana
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.440.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksana
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	95.694.272,-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksana
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	28.939.600,-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksana
		Program Pengembangan Perumahan	758.750.115,-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksana
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	382.879.605,-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksana
Subtotal Sasaran			3.677.036.904,-		
11.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	593.964.500,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	158.687.100,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KENATI)	122,686,950,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5,448,000,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	8.748.650,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38,808,790,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7.721.200,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16,723,542,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	149.996.719,-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terlaksana



		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	3.000.000,-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksana
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4.806.197.900,-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksana
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	28,999,750,-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terlaksana
Subtotal Sasaran			5.728.316.069,-		
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis					
12.	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	64.363.142,-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksana
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.093.550,-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksana
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	247,734,084,-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksana
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksana
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	11.963.690.556,-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksana
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta budaya politik	326,391,690,-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terlaksana
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.287.038.258,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksana
		Program Pembinaan Sejarah	200.000.000,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksana
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	659.699.298,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksana
		Program Pengelolaan Permuseuman	1.239.100.000,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksana
		Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.000.000,-	Kecamatan	Terlaksana
Subtotal Sasaran			15.437.984.804,-		
GRAND TOTAL			171.410,499.581,-		
			-		

Sumber : Data Bagian Ortala Setda Kab. Majene Tahun 2023

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan skema Tugas Pembantuan, hal tersebut dilaksanakan karena tidak semua kewenangan dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah pusat sehingga perlu untuk dilakukan pendelegasian tugas kepada Daerah Otonom. Dengan dilaksanakannya pendelegasian tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara kita menganut 3 (tiga) asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut dilaksanakan secara selaras, serasi, seimbang guna mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang desentralistik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, stabilitas dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah, yaitu Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan suatu upaya dalam membantu daerah mencapai kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini menjadi sangat penting, karena pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Daerah.

Pengertian Tugas Pembantuan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11 adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum serta membantu Pengembangan Pembangunan bagi Daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota serta Desa).

Dana Tugas Pembantuan merupakan anggaran dari Kementerian yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberikan penugasan. Dana Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Negara / Lembaga yang dialokasikan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Negara / Lembaga dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota.

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Adapun Dasar Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4355);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4816);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5887);
- m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 menerima 3 (*tiga*) Tugas Pembantuan (TP) dari 3 (*tiga*) Kementerian pada Bidang Urusan Tenaga Kerja, Perdagangan, dan Pertanian dengan jumlah 3 (*tiga*) kegiatan, yang dilaksanakan oleh 3 (*tiga*) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan anggaran sebesar Rp. 3.927.845.567,- Terbilang : (*Tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Kementerian pemberi Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- c. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten / Kota

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Target Kinerja

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, Wirausaha Baru, dan Tenaga Kerja Mandiri menargetkan Kepesertaan diikuti sampai dengan 140 Orang.

b. Realisasi

Realisasi atas Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, Wirausaha baru, dan Tenaga Kerja Mandiri mencapai 100%.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

a. Target Kinerja

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan menargetkan Pembangunan / Revitalisasi 1 Pasar Rakyat Malunda.

b. Realisasi

Realisasi atas Kegiatan Pengembangan Sarana dan Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan mencapai 100%.



3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

a. Target Kinerja

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura menargetkan Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yaitu Bawang Merah sebesar 240 Ton dan Cabai Rawit sebesar 300 Ton.

b. Realisasi

Realisasi atas Kegiatan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yaitu Bawang Merah mencapai 640 Ton atau sebesar 266,67% dan Cabai Rawit mencapai 352 Ton atau sebesar 117,33%.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

No.	Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Keluaran (Output) : Jumlah Wirausaha Baru dan Tenaga Kerja Mandiri Rincian Kegiatan : Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Majene	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 492.390.000	Rp. 489.344.397	99,38	140 Orang	100	



No.	Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Keluaran (Output) : Jumlah Pasar Rakyat yang terbangun Rincian Kegiatan : Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Malunda Kec. Malunda Kab. Majene	Kec. Malunda Kab. Majene	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.363.798.900	94,55	1 Pasar Rakyat	100	
3.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan	Program Pembangunan Pertanian Kegiatan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Keluaran (Output) : Jumlah Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Rincian Kegiatan : Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Komoditi Unggulan Daerah yaitu Bawang Merah dan Cabai Rawit	Kab. Majene	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Rp. 935.455.567	Rp. 903.182.350	96,55	Bawang Merah : 640 Ton Cabai Rawit : 352 Ton	266,67 117,33	
Total						Rp. 3.927.845.567	Rp. 3.756.325.647	95,63			

Sumber : Data OPD Pelaksana Tugas Pembantuan di Kab. Majene Tahun Anggaran 2023

3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten / Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 tidak menerima Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

3.4. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya dana pembelanjaan bantuan barang yang diserahkan kepada kelompok, sehingga masih perlu penambahan kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan;
- b. Dalam kegiatan pelatihan, masih diperlukan penambahan waktu pelaksanaan dari tiga hari menjadi lima hari;
- c. Masih diperlukan tenaga pendamping dalam membina kelompok usaha tenaga kerja mandiri di lapangan.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Alokasi Anggaran ke Kabupaten Majene yang terlambat sehingga menghambat Percepatan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. Terdapat Pemotongan Pagu Anggaran akibat Refocussing sebagai Dampak Covid-19, sehingga yang awalnya Rencana Bangunan harus sesuai dengan Prototipe yang diberikan oleh Pihak Kementerian dan akhirnya Rencana Bangunan disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang dialokasikan ke Kabupaten Majene.

3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan tidak menemui kendala yang berarti.

3.5. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran dan tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam pelaksanaan kegiatan dimasa akan datang, dibutuhkan dana yang cukup untuk melengkapi kelompok usaha yang dibimbing, serta dapat menjangkau para pengangguran yang selama ini belum tersentuh kegiatan pelatihan. Tindak lanjut yang diharapkan adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap sejalan untuk melaksanakan kegiatan tugas pembantuan.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kedepan, yaitu agar Realisasi Alokasi Anggaran ke Kabupaten sebisa mungkin untuk dipercepat, mengingat untuk Pelaksanaan Pembangunan membutuhkan waktu yang sangat tergantung dari Iklim Cuaca.

3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene tidak memiliki saran dan tindak lanjut.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Majene yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pendidikan anak usia dini;
 Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Pendidikan dasar;
 Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- Pendidikan kesetaraan;
 Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut;

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
 - Perlengkapan Dasar peserta didik pendidikan anak usia dini meliputi;

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %
		Tahun 2023
1	buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	76%
2	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.	76%

- Perlengkapan dasar peserta didik sekolah dasar meliputi;

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %
		Tahun 2023
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	80%
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	80%

- Perlengkapan dasar peserta didik sekolah menengah pertama meliputi;

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %
		Tahun 2023
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	80%
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	85%

- Perlengkapan dasar peserta didik pendidikan kesetaraan meliputi;

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %
		Tahun 2023
1	1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	80%
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	80%

- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan meliputi;

- Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini terdiri atas;

- Jenis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, meliputi ;

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Tenaga Pendidik yang bersertifikat atau berijazah PAUD	76%

- Kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD, meliputi;

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	51%
2	Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia Dini	51%

- Kualitas Kepala satuan pendidik PAUD meliputi ;

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	75%
2	Memiliki sertifikat pendidik	70%
3	Memiliki sertifikat Kepala Sekolah	70%

- b) Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar terdiri atas, Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD :

- Kualitas Tenaga pendidik SD meliputi;

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	85%
2	Memiliki sertifikat pendidik	85%

- Kualitas kepala satuan pendidikan SD meliputi;

No	Kepala satuan Pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	95%
2	Memiliki sertifikat pendidik	95%
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	95%

- Kualitas tenaga penunjang lainnya SD meliputi :

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	85%

c) Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama terdiri atas;

- Kualitas tenaga pendidik SMP meliputi :

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki jazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	85%
2	Memiliki sertifikat pendidik	85%

- Kualitas kepala satuan pendidikan SMP meliputi;

No	Kepala satuan pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	95%
2	Memiliki sertifikat pendidik	95%
3	Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	95%

- Kualitas tenaga penunjang lainnya SMP meliputi ;

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	95%

d) Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan terdiri atas ;

- Kualitas tenaga pendidik (Tutor) kesetaraan meliputi;

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang menenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki jazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	90%

- Kualitas kepala satuan pendidikan Kesetaraan meliputi;

No	Kepala satuan pendidikan	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang menenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	93%

- Kualitas tenaga penunjang lainnya Pendidikan Kesetaraan meliputi;

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang menenuhi SPM (%)
		Tahun 2023
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	95%

4.1.3 Realisasi Tahun 2023

Tabel 4.1. Realisasi Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)	$\frac{6.427}{11.250} \times 100$	57,29
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	$\frac{19.258}{20.785} \times 100$	92,65
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Warga Negara Usia 13 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	$\frac{8413}{9849} \times 100$	85,42
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	$\frac{1.330}{1.330} \times 100$	100,00

		dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
--	--	---	--	--

4.1.4 Alokasi Anggaran

Hingga akhir Desember tahun 2023 alokasi anggaran yang dikhususkan untuk SPM Bidang Pendidikan memang tidak ada, akan tetapi ada komponen kegiatan yang mendukung penyelenggaraan SPM sebagai berikut:

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Bidang Penanggungjawab
Program Pendidikan Anak Usia Dini		10,412,599,337	
1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	90,245,525	Bidang PAUD PNF
2	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	5,733,841,287	Bidang PAUDPNF
3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	4,097,774,000	Bidang PAUDPNF
4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	99,491,600	Bidang PAUDPNF
5	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	8,400,000	Bidang PAUDPNF
6	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	382,846,925	Bidang PAUDPNF
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		38,562,348,890	
1	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai	350,000,000	Bidang Dikdas

	lulus		
2	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	28,211,469,050	Bidang Dikdas
3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	558,470,240	Bidang Dikdas
4	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	41,093,600	Bidang Dikdas
5	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	7,634,775,000	Bidang Dikdas
6	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	99,967,200	Bidang Dikdas
7	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	869,400,000	Bidang Dikdas
8	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	797,173,800	Bidang Dikdas
Program Pendidikan Non Formal		3.364.721.787	
1	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	1,834,600,000	Bidang PAUDPNF
2	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	49,745,800	Bidang PAUDPNF



4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Dukungan Personil Tahun 2023

NAMA JABATAN	ESELON	JUM LAH	GOL/PANGKAT						DIKLAT STRUKTURAL			
			I	II	III	I V	P 3 K	JU M LA H	PI M I	PI M II	PI M III	PI M IV
STRUKTURAL												
Kepala Dinas	2B	1				1		1		1		
Sekretaris	3A	1				1		1			1	
Kepala Bagian/Bidang	3B	4			2	2		4				2
Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi	4A	7			6	1		7				1
Kepala UPTD Pendidikan	4A	9			6	3		9				
Kepala Tata Usaha UPTD GOR	4B	1			1			1				
JUMLAH		23			15	8		23		1	1	3
1. Pelaksana Disdik		47		3	43	1		47				
2. Penjaga SD		8		8				8				
3. Pelaksana UPTD		35		10	24	1		35				
JUMLAH		90	0	21	67	2		90				
JUMLAH STRUKTURAL		103	0	21	72	10		103		1	1	3
FUNGSIONAL :												
1. Fungsional Tertentu		5			4	1		5				
2. Pengawas TK, SD, SMP, SMA,SMK		20				20		20				
3. Guru TK		123		5	89	29	11	134				
4. Guru SD		815		56	558	201	171	986				
5. Guru SMP		391		1	193	197	65	456				
6. Pamong (UPTD SKB)												
JUMLAH		1.354	0	62	844	448	247	1.601				
JUMLAH TOTAL		1.457	0	83	916	458	247	1.704		1	1	3

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.4 Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Sulitnya mendeteksi Anak yang Tidak Sekolah (ATS) pada usia 7 s.d. 18 Tahun	Perlu ada pendataan Anak Tidak Sekolah Usia 7 s.d. 18 Tahun di tiap Kecamatan dan perlu dibentuk tim khusus Pendataan

2	Belum ada kegiatan khusus yang menangani masalah SPM	Perlu dianggarkan pada Dinas Pendidikan untuk Penyelenggaraan SPM Pendidikan
3	Perencanaan dan Penganggaran belum menyasar semua item yang terkait pemenuhan SPM	Perlu perencanaan dan Penganggaran yang yang membiayai semua kegiatan sebagai pemenuhan SPM
4	Belum maksimalnya kerja TIM yang menangani pendataan terkait pelaksanaan SPM.	TIM yang dibentuk dapat bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 12 layanan dasar yaitu:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Adapun Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.5 Target Pencapaian SPM oleh Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100 %

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
10	Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV)	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	100 %

4.2.3 Realisasi Tahun 2023

Tabel 4.6 Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Realisasi Kinerja			
			Jumlah Sasaran	Jumlah yang Dilayani	Jumlah yang Belum Dilayani	Persentase Capaian
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN MAJENE						80%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					73,19%
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard		4.177	3.057	1.120	
	1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	4.177	3.929	248	94,06%
	2	Tablet Tambah Darah	4.177	3.057	1.120	73,19%
	3	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.177	3.929	248	94,06%
	4	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	4.177	3.929	248	94,06%
	5	Buku KIA	4.177	3.929	248	94,06%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					91,47%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuaai standard		3.987	3.647	340	
	1	Formulir Fotograf	3.987	3.707	284	92,88%
	2	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	3.987	3.707	284	92,88%
	3	Buku KIA	4.177	3.929	248	94,06%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					97,52%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard		3.797	3.703	94	
	1	Vaksin Hepatitis BO	3.797	3.808	0	100%
	2	Vitamin K1 Injeksi	3.797	3.808	0	100%
	3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	3.797	3.808	0	100%
	4	Formulir Bayi Baru Lahir	3.797	3.808	0	100%
	5	Formulir MTBM	3.797	3.808	0	100%
	6	Buku KIA	4.177	3.929	248	94,06%
4	Pelayanan kesehatan balita					67,37%
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard		13.279	9.192	4.452	
	1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	13279	9.192	4.452	67,37%

2	Formulir DDTK	13279	9.192	4.452	67,37%
3	Buku KIA	13279	9.192	4.452	67,37%
4	Vitamin A Biru	3160	2580	798	76,38%
5	Vitamin A Merah	13279	11572	2.072	84,81%
6	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	4246	3.088	709	81,33%
7	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	13077	9.192	4.452	67,37%
8	Jarum Suntik dan BHP	11	11	0	100%
9	Peralatan Anafilaktik	11	11	0	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				86,41%
	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat layanan skrining kesehatan sesuai standard	29.733	25.691	4.042	
1	Buku Raport Kesehatanku	29.733	25.691	4.042	86,41%
2	Buku Pemantauan Kesehatan	29.733	25.691	4.042	86,41%
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	29.733	25.691	4.042	86,41%
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	11	11	0	100%
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	11	11	0	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				57,16%
	Jumlah warga negara usia produktif (15-59 Thn) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard	106.657	60.961	45.696	
1	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	144	96	48	67%
2	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	11	11	0	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				55,71%
	Jumlah warga negara usia lanjut (≥ 60 Thn) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard	13.799	7.688	6.111	
1	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	13.799	7.688	6.111	55,71%



	2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	13.799	7.688	6.111	55,71%
	3	Buku Kesehatan Lansia	13.799	-	13.799	0%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					52,17%
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard		7.680	4.007	3.673	
	1	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	11	11	0	100%
	2	Tensimeter	144	96	48	67%
	3	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	11	11	0	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					83,59%
	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard		853	713	140	
	1	* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	10.236	8.556	1.680	83,59%
	2	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	11	11	0	100%
	3	Pedoman dan Media KIE	11	11	0	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					76,79%
	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan sesuai standard		349	268	81	
	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	11	11	0	100%
	2	Kit berisi 2 alat fiksasi	11	0	11	0%
	3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	11	11	0	100%
	4	Media KIE	11	11	0	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100%
	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard		3.456	4.19	0	
	1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	11	11	0	100%
	2	Reagen Zn TB	3.456	4.19	0	100%
	3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	3.456	4.19	0	100%

	4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	3.456	4.19	0	100%
	5	Catridge tes cepat molekuler	3.456	4.19	0	100%
	6	Formulir pencatatan dan pelaporan	11	11	0	100%
	7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	11	11	0	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					89,46%
	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standard		5.159	4.615	544	
	1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	11	11	0	100%
	2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	5.159	4.615	544	89,46%
	3	Bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK)	11	11	0	100%

4.2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2023 terdiri dari beberapa sumber, diantaranya yaitu:

1. APBD Kabupaten

Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Majene yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Majene sebesar Rp. 164.791.432.211 yang terdiri dari:

- a) Belanja Langsung sebesar Rp. 120.724.706.256 dengan penyerapan sebesar Rp. 120.724.706.256 (100%)
- b) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 44.066.725.955 dengan penyerapan sebesar Rp 44.066.725.955 (100%)

2. APBD Provinsi

Alokasi Anggaran bersumber APBD Provinsi yang dikelola Dinas Kesehatan tahun Angaran 2022 Nihil.

3. APBN

Alokasi anggaran bersumber dari APBN yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan masuk sebagai batang tubuh APBD kabupaten

Majene tahun anggaran 2022 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 12.857.660.989,- dengan penyerapan sebesar Rp. 12.720.397.640,- (99,9%), sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.8.126.439.000, dengan penyerapan sebesar Rp. 7.520.181.011 (92,54%).

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Majene tahun 2023 adalah **1.291** pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan 11 Puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2023 sebesar 73,19 %, capaian tersebut masih belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena:

- Kegiatan advokasi peningkatan cakupan layanan ANC dan Pembinaan kelas Ibu Hamil belum memberi daya ungkit yang signifikan terhadap cakupan layanan, rendahnya dukungan keluarga untuk ibu dalam memenuhi komponen layanan selama hamil.
- Masih terdapat terdapat ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan
- Pemberdayaan/peran serta masyarakat dan peran lintas sektor masih belum optimal
- Pemantauan Ibu Hamil berdasarkan pemenuhan komponen P4K relative masih rendah, Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin masih perlu ditingkatkan
- Proses pengumpulan data dari semua fasilitas kesehatan oleh petugas perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh lebih optimal.

Solusi

- Penguatan e-Kohort Ibu Hamil bagi Bidan untuk identifikasi dan memenuhi komponen layanan bagi Ibu Hamil sesuai dengan standar.

- b. Peningkatan alokasi anggaran untuk Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui skema PBI dan diluar kuota PBI
- c. Meningkatkan peran serta kader dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi warga tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak
- d. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA
- e. Peningkatan kualitas data dengan cara meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.
- f. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Bidan Mandiri (SIBIMA) diharapkan mampu mengurangi kehilangan data dari bidan praktek mandiri
- g. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Fasilitas Kesehatan (SIPFASKES) yang merupakan salah satu inovasi dari pegawai dinas kesehatan, diharapkan dapat diterapkan dengan baik sehingga mampu mengurangi kehilangan data dari fasilitas kesehatan swasta seperti klinik dan rumah sakit

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2023 sebesar 91,47%. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan (100%), hal ini disebabkan:

- a. Kegiatan optimalisasi dan advokasi Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K) belum berjalan sebagaimana harusnya, yaitu setiap komponen P4K terutama dukungan keluarga belum semuanya terpenuhi.
- b. Sebagian penduduk lebih memilih untuk melakukan persalinan di kampung halaman (luar Kabupaten Majene) sehingga mempengaruhi capaian persalinan ditolong kesehatan
- c. Perpindahan penduduk dari luar Kabupaten Majene yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor
- d. Masih terdapat status ekonomi masyarakat kurang sehingga masih ditemukan persalinan di paraji
- e. Proses pengumpulan data dari semua fasilitas kesehatan oleh petugas perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh lebih optimal.

Solusi

- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan peran serta aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan
- b. Peningkatan alokasi anggaran untuk Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui skema PBI dan diluar kuota PBI
- c. Mensosialisasikan Perda KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Anak Balita) secara lebih luas
- d. Meningkatkan peran aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta terhadap kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait program kesehatan ibu dan anak
- e. Meningkatkan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri). Dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2023 tercapai 97,52%. Capaian tersebut belum memenuhi target karena:

- a. Pengetahuan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan berbagai keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum sesuai standar.
- b. Proses pengumpulan data dari semua fasilitas kesehatan oleh petugas masih perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh lebih optimal.

Solusi

- a. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA
- b. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri). Dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2023 sebesar 67,37%. Rendahnya cakupan ini disebabkan karena:

- a. Belum semua Desa mempunyai tenaga terlatih SDIDTK
- b. Masih Kurangnya media informasi dan pencatatan kesehatan/ hasil pelayanan
- c. Sarana dan prasarana Posyandu tidak menunjang untuk pelaksanaan pementauan perkembangan
- d. Belum tersedianya Bahan Formula untuk penanganan Balita Sakit (Gizi Buruk)

Solusi

- a. Penguatan Peran Lintas Sektor Dalam Pemanfaatan Posyandu
- b. Peningkatan Kapasitas Kader/ Tenaga Kesehatan terlatih SDIDTK
- c. Penyebarluasan Informasi melalui media edukasi dan Pengadaan alat edukasi
- d. Monitoring dan Evaluasi Pemerintah kabupaten dan Kecamatan dalam pelaksanaan Tumbuh Kembang Balita
- e. Penyediaan Bahan Formula untuk penanganan gizi buruk

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2023 sebesar 86,41%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya capaian tersebut diantaranya:

- a. Pemahaman DO indikator kinerja yang masih keliru
- b. Buku rapor kesehatan dan buku pemantauan kesehatan sangat terbatas
- c. Form Penjaringan dan lembar skrining tidak tersedia
- d. Form Penjaringan dan lembar skrining tidak tersedia
- e. Sasaran di luar sekolah belum mendapatkan pelayanan maksimal
- f. Dukungan anggaran kegiatan sangat terbatas

Solusi

- a. Bimtek SPM untuk TP Program Puskesmas
- b. Tersedianya buku kesehatan rapor kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik
- c. Tersedianya form penjaringan dan lembar skrining sejumlah sasaran usia pendidikan dasar
- d. Penambahan anggaran kegiatan baik dari sumber DAK NF maupun DAU

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2023 sebesar 57,16%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan namun telah dapat meningkatkan cakupan dari tahun 2023 yaitu 100%. Beberapa faktor belum tercapainya target adalah :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan medical check up secara mandiri
- b. Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan luar gedung belum terkoordinir dengan baik, selain itu data yang diperoleh juga belum mencakup dari semua fasilitas kesehatan yang ada

Solusi

- a. Advokasi pembentukan dan pemanfaatan Posbindu terpadu tingkat desa, dan upaya pemenuhan logistik BHP melalui ADD.
- b. Meningkatkan sosialisasi skrining kesehatan pada semua instansi/perusahaan
- c. Meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan
- d. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat
- e. Perbaikan pencatatan dan pelaporan terutama pada kegiatan luar gedung
- f. Peningkatan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri, praktek dokter perorangan)

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2023 sebesar 55,71% telah menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai tercapai 76,6%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut diantaranya :

- a. Pemahaman DO indikator kinerja yang keliru
- b. Tidak tersedia buku kesehatan Lansia, Form skrining dalam paket P3G
- c. Stik Uji GDS dan Kolesterol terbatas
- d. Masih minimnya ketersediaan posbindu
- e. Data masih sebatas dari puskesmas dan posbindu

- f. Masih rendahnya pengetahuan pemegang program lansia di puskesmas dalam pengisian format laporan

Solusi

- a. Tersedianya penganggaran untuk meningkatkan capaian kinerja
- b. Bimtek SPM untuk TP Program Puskesmas
- c. Tersedianya buku kesehatan Lansia dan Form skrining dalam paket P3G
- d. Tersedianya stik pemeriksaan GDS dan kolesterol sejumlah sasaran Lansia
- e. Meningkatkan kemampuan Kader Kesehatan yang terlatih melalui pelatihan teknis bidang kesehatan
- f. Menyederhanakan sistem pencatatan dan pelaporan agar lebih mudah dipahami

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Permasalahan

Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Majene tahun 2023 ditetapkan menggunakan angka prevalensi hipertensi Kota Majene (Riskesdas 2018) terhadap proyeksi penduduk usia 15 tahun keatas sehingga didapatkan sebesar 7.680 jiwa, sedangkan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 4.007 jiwa, berdasarkan komponen cakupan ini baru mencapai 52,17%. Capaian tersebut masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Salah satu komponen yang belum terpenuhi adalah tersedianya Alat pemeriksaan Tekanan darah yang hanya terpenuhi 67% dari kebutuhan.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi
- c. Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin
- d. Masih terbatasnya ketersediaan posbindu
- e. Data dari fasilitas kesehatan swasta belum dilaporkan semua
- f. Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terkoordinir dengan baik mengakibatkan data yang dihimpun masih minim.

Solusi

- a. Pemenuhan komponen layanan terutama ketersediaan alat pemeriksaan Tekanan Darah.
- b. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor misal dengan perusahaan, organisasi profesi, kantor pemerintah dan swasta untuk melakukan pelayanan skrining di tempat kerja
- d. Meningkatkan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri, dokter praktek perorangan). Dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Permasalahan

Jumlah penyandang DM di Kabupaten Majene tahun 2023 ditetapkan berdasarkan angka prevalensi DM nasional (Riskesdas 2018) terhadap proyeksi penduduk semua umur sehingga didapatkan sebesar 853 jiwa, sedangkan jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 713 jiwa (83,59%). Capaian ini dibawah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepatuhan pengiriman laporan dari fasilitas kesehatan swasta.

Solusi

Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Majene tahun 2023 ditetapkan menggunakan angka prevalensi OGDJ (orang dengan gangguan jiwa) Provinsi Sulawesi Barat (Perhitungan SPM ODGJ) terhadap proyeksi penduduk semua usia Kabupaten Majene sehingga didapatkan sebesar 349 jiwa, sedangkan jumlah OGDJ (orang dengan gangguan jiwa) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 268 jiwa (76,79%). Capaian tersebut masih kurang dari target, karena

Permasalahan

- a. Ketersediaan obat untuk penderita pasien ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sangat kurang.

- b. Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah ODGJ.
- c. Stigma terhadap penderita ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) masih tinggi sehingga keluarga tidak mau melaporkan keluarganya yang menderita ODGJ (orang dengan gangguan jiwa)

Solusi

- a. Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah ODGJ (orang dengan gangguan jiwa)
- b. Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah ODGJ (orang dengan gangguan jiwa)
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) tahun 2023 sebesar 118,89% dan telah memenuhi target Nasional. Hal ini disebabkan karena:

- a. Kegiatan penemuan terduga TBC dilakukan tidak hanya pada penderita dengan gejala klinis TBC tetapi juga kepada factor risiko seperti : Ibu hamil, Penderita DM, Lansia, dan kontak erat penderita).
- b. Kegiatan penemuan kasus TBC telah di fasilitasi dengan 4 mesin Test Cepat Molekuler (TCM) untuk memudahkan pemeriksaan terduga TBC (RSUD majene, PKM Sendana I, PKM sendana II dan PKM Malunda).
- c. Kerja sama lintas program semakin baik terbukti dengan semakin banyaknya factor risiko TBC yang diperiksa dahaknya sehingga capaian tahun 2023 bisa mencapai target.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Orang berisiko terinfeksi HIV yang sudah mendapatkan pemeriksaaan HIV sesuai standar di Kabupaten Majene tahun 2023 tercapai 89,46%. Capaian ini telah lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

Permasalahan

- a. Masih kurangnya kesadaran untuk melakukan screening HIV secara sukarela pada layanan kesehatan terutama sasaran populasi kunci.
- b. Pemeriksaan HIV masih dianggap tabu apalagi jika terdeteksi Positif, takut dijauhi keluarga dan orang-orang sekitarnya, penderita kadang menarik diri dan tidak mau berobat.
- c. Masih kurangnya petugas terlatih untuk konseling HIV dan cara pendekatan pada sasaran terutama populasi kunci

- d. Belum ada kebijakan tentang aturan untuk populasi kunci wajib dilakukan tes HIV.
- e. Belum dilakukan pemetaan pada sasaran berhubung adanya keraguan menetapkan seseorang terduga sebagai sasaran populasi kunci

Solusi

Tindak lanjut kondisi tersebut antara lain dengan:

- a. Meningkatkan Edukasi/Promosi kesehatan mengenai HIV kepada Masyarakat umum
- b. . Melakukan pemetaan sasaran terutama populasi kunci.
- c. Melakukan Blusukan pada kelompok-Kelompok Populasi Kunci dan Lebih giat lagi memotivasi sasaran populasi kunci agar mau sukarela melakukan screening HIV minimal setiap tahun
- d. Dibutuhkan dukungan anggaran untuk pelatihan bagi petugas dan anggaran Screening HIV
- e. Melakukan Advokasi tetang kebijakan aturan wajib screening HIV bagi sasaran yang beresiko terutama populasi kunci

4.3.URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1. Jenis Pelayanan dasar

Kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2016 - 2021 menggambarkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2016-2021, Pemerintah Daerah telah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada 9 jenis pelayanan dasar yang harus dipedomani oleh Dinas PUPR, yaitu :

1. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat : persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
2. Penyediaan air minum : persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
3. Penyediaan sanitasi : persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun;

- Penataan Bangunan dan Lingkungan : persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
- Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan : persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
- Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi : persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
- Izin Usaha Jasa konstruksi : persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap;
- Informasi Penataan Ruang : persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital;
- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik : persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Namun untuk saat ini jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten/ Kota :

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** pada Bidang Cipta Karya pada tahun 2023 Kabupaten Majene berdasarkan RPJMD/Renja.

Tabel 4.7 Target Pencapaian SPM oleh Dinas PUPR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Cipta Karya
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Cipta Karya

	limbah Domestik	pengolahan air limbah domestic			
--	-----------------	--------------------------------	--	--	--

4.3.3 Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Target Pencapaian SPM oleh Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	71.33 %	Membidangi Bidang Cipta Karya
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	73,53 %	Membidangi Bidang Cipta Karya

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 capaian SPM untuk jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari yaitu 71,53 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,80 % dimana pada tahun sebelumnya capaiannya hanya 69,53 %. Sama halnya dengan jenis pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaiannya mengalami peningkatan sebesar 1,9 % dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun sebelumnya capaiannya hanya 71,63 % sedangkan tahun 2021 sebesar 73,53 %.



Gambar 4.1 Kegiatan Hibah Air Limbah Setempat



Gambar 4.2 Kegiatan SLBM

4.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.9. APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No .	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Bidang Cipta Karya			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.472.279.000,00	6.663.519.142	89,18
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.056.169.500,00	5.946.788.400	98,19
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.508.700.000,00	1.868.448.773	74,48
	Program Pengembangan Permukiman	498.500.000,00	292.500.000	58,68
	Program Penataan Bangunan Gedung	2.782.825.000,00	1.687.573.510	60,64
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	5.944.640,00	1.860.000	95,63
	Bidang Bina Marga			
	Program Penyelenggaraan Jalan	34.372.722.569,00	29.914.661.670	87,03
	Bidang Pengairan			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.196.213.000,00	13.769.522.950	90,61
	Bidang Peralatan dan Perbekalan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.053.529,00	39.778.700	33,98
	Bidang Penataan Ruang			

No .	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	343.786.303,00	103.555.400	30,12
	Sekretariat			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.048.757.252,00	5.103.928.529	82,77

Tabel 4.10 APBN/DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Bidang Cipta Karya			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.037.809.000,00	5.837.613.039	96,68
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.813.293.000,00	5.813.200.000	100,00
	Bidang Bina Marga			
	Program Penyelenggaraan Jalan	13.974.188.000,00	13.801.559.757	98,76
	Bidang Pengairan			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.335.068.000,00	2.275.874.850	95,42

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi

dinas.Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten. Majene adalah sebanyak 61 orang.dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11 Dukungan Personil PUPR

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Bidang Cipta Karya	8
	Kepala Bidang	1
	JF. Teknik Penyehatan Lingkungan	1
	Staf	6
	Bidang Bina Marga	9
	Kepala Bidang Bina Marga	1
	JF. Teknik Jalan dan Jembatan	1
	Staf	7
	Bidang Pengairan	8
	Kepala Bidang Pengairan	1
	JF. Teknik Pengairan	2
	Staf	5
	Bidang Peralatan dan Perbekalan	11
	Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan	1
	JF. Analis Kebijakan	2
	Staf	8
	Bidang Penataan Ruang	8
	Kepala Bidang Penataan Ruang	1
	JF. Penata Ruang	2
	Staf	5
	Sekretariat	14
	Sekretaris	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-
	Kasubag Keuangan	1
	JF. Perencana	1
	Staf	11
	UPTD Pengolahan Air Limbah	2
	Kepala UPTD	1
	Kepala TU	1
	Total	61

4.3.6 Permasalahan yang dihadapi

Secara umum permasalahan yang dihadapi **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan Kualitatif dibidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa permendagri No 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan, bidang perumahan rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dikabupaten;

Pelaksanaan pengumpulan data dan bantuan stimulant perbaikan rumah terdampak bencana gempa bumi kabupaten majene Tahap II dimulai pada bulan januari 2023 dengan mengumpulkan data jumlah kerusakan rumah yang dilaksanakan oleh BPBD dibantu pemerintah kecamatan lurah dan desa. data yang diperoleh dari pemerintah desa dan kelurahan dikumpulkan dari 4 kecamatan yaitu kecamatan malunda, ulumanda, tubo sendana dan kecamatan tammerodo sendana, terdiri dari 34 desa dan 2 kelurahan, jumlah data yang diperoleh yaitu sebanyak 5.343 unit rumah, data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan tingkat kerusakan rumah yang sesungguhnya berdasarkan kategori rusak ringan (RR), Rusak Sedang (RS), dan Rusak Berat (RB). Dari 5.343 unit yang dilakukan verifikasi dan validasi diperoleh data tingkat kerusakan rumah sebagai berikut:

- Rusak Berat sebanyak 388 unit;
- Rusak Sedang sebanyak 837 unit;
- Rusak Ringan sebanyak 3.000 unit;

Data tersebut diatas dengan total 4.225 setelah dilakukan Verifikasi dan Uji Publik. Jadi dengan demikian jumlah data rumah rusak akibat bencana gempabumi Kabupaten Majene Tahap II adalah sebanyak 4.225 Unit.

- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program;

Pada tahun anggaran 2023 tidak ada kegiatan terkait pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten majene.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka yang menjadi target capaian adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
2. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.12 Target SPM Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	4.225	KK	100%
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	Orang	100%

4.4.3 Realisasi SPM

Realisasi pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Majene Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.13 Realisasi SPM Perumahan Rakyat

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1.	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	4.225	24	KK	0,57

2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-	Orang	100
----	--	---	---	-------	-----

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dari 4.225 unit yang hanya terealisasi 24 unit berupa pembangunan rumah relokasi di Desa Kabiraan sedangkan sisanya yaitu sebanyak 4.201 unit masih berupa data dan belum dilaksanakan di Tahun 2023.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 adalah :

Tabel 4.14 Alokasi Anggaran Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp)	APBN (Rp)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	4.225	KK	-	-
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	Orang	-	-

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene adalah:

Tabel 4.15 Dukungsn Personil Perumahan Rakyat

NO.	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	1
	e. IV.b	-

2.	JABATAN FUNGSIONAL	7
3.	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	4
	b. III	19
	c. II	1
	d. I	-
4.	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S2	4
	b. S1/DIV	30
	c. DIII	-
	d. SMA sederajat	-
	e. SLTP Sederajat	-

Sumber Daya Manusia pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian selaku Dinas Teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas kurang mencukupi, namun secara kualitas sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 30% dan tenaga non teknis sebanyak 70%, perbandingan jumlah tenaga teknis dan non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70 % untuk tenaga teknis dan 30% non teknis.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

- 1) Untuk penanganan bencana pemerintah daerah memberikan wewenang ini kepada BPBD sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten Majene banyak bersumber dari BPBD Kabupaten Majene .
- 2) Kejelasan terkait Zona Merah di Desa Kabiraan yang merupakan salah satu Lokasi lahan yang menjadi rencana Relokasi yang belum siap untuk di tempati

Solusi :

- 1) Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota diarahkan ke BPBD Majene selaku leading sektor untuk penanganan bencana daerah .
- 2) Perlu segera mendapatkan data terkait kejelasan zona merah di desa kabiraan dengan melakukan koordinasi dengan Propinsi Sulawesi Barat terkait penyiapan lahan Relokasi dan mencari alternative relokasi mandiri

untuk lahan permukiman warga.

4.5.URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

a. Dinas Satpol PP

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Majene adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene dan Peraturan Bupati Majene Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Adapun jenis urusan wajib pelayanan dasar SPM sebagai berikut ;

- Program pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Mayarakat

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Penncegahan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Tabel 4.16 Target SPM Dinas Satpol PP

No	Jenis Pelayanan dasar	Indikator SPM	Komponen	Nilai
1.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	1. Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda	10
			2. Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan layanan pada kawasan terkena dampak akibat dari penegak	10



Tabel 4.17 Target SPM BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	
		%	Tahun
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	2021
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	2021
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	2021
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	2021

4.5.3

Realisasi SPM

Tabel 4.18 Realisasi SPM Dinas Satpol PP

N o	Jenis pelayanan	Indikator	Capaian 2022 %	Target 2023%	Program /Kegiatan	Rencana Pembiayaan	Target 2024%	Program /kegiatan	Rencana pembiayaan
1	Pemeliharaan ketentraman & ketertiban masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Tidak ada	50 %	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	50.000.000	55%	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	55.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2022
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	30 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	45 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	52 %

4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	75 %	Tabel	4.19
			Realisasi	SPM
			BPBD	

4.5.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023

a. Urusan Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selama 1 Tahun Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Tidak Langsung	3.639.297.820,00	3.550.916.469,00	97,57
2	Belanja Langsung	1.141.403.820,00	1.126.298.830,00	98,68

b. Urusan BPBD

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang Trantibunlinmas tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar **Rp 5.797.023.632** dengan rincian sebagai berikut:

1. BelanjaLangsung	: Rp. 1.734.654.678,-
2. BelanjaTidakLangsung	: <u>Rp. 4.002.223.632,-</u>
TOTAL	Rp. 5.797.023.632,-

4.5.5 Dukungan Personil

a. Personil Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas.Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene adalah sebanyak 53 orang.dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Bidang Trantibun	31
	Kepala Bidang Trantibun	1

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	1
	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	1
	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	1
	Staf	27
	Bidang Sumber Daya Aparatur	6
	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	1
	Kepala Seksi Kerjasama	1
	Kepala Seksi Teknis Fungsional	1
	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	1
	Staf	2
	Bidang Penegakan Perda	9
	Kepala Bidang Penegakan Perda	1
	Kepala Seksi Penindakan	1
	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1
	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi	1
	Staf	5
	Sekretariat	7
	Kasat	1
	Sekretaris	
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
	KasubagKeuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
	Staf	4
	Total	53

b. Personil BPBD

1. Status Kepegawaian
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 38 Orang
 - Tenaga Kontrak : 148 Orang
2. Latar belakang Pendidikan PNS
 - Magister (S2) : 3 Orang
 - Sarjana (S1 /DIV) : 14 Orang
 - SLTA : 18 Orang
 - SLTP : 3 Orang
 - SD : - Orang
3. Golongan/Pangkat
 - Golongan IV : 5 Orang
 - Golongan III : 16 Orang
 - Golongan II : 17 Orang
 - Golongan I : 0 Orang

4.5.6 Permasalahan yang Dihadapi

a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum permasalahan yang dihadapi **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran / APBD dan adanya pemangkasan anggaran akibat COVID 19;
- b. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur terutama PPNS dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM dengan Kegiatan yang dilaksanakan;

b. Permasalahan BPBD

Secara umum permasalahan yang dihadapi **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM
- d. Adanya Recofusing/Pengurangan Anggaran akibat COVID 19.

4.6.BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2021 - 2026 menggambarkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah telah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial ada 5 jenis pelayanan dasar yang harus dipedomani oleh Dinas Sosial, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial Khusus gelandangan dan pengemis diluar panti;

5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Namun untuk saat ini jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majene mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten/ Kota :

1. Pelaksanaan Program/kegiatan Bidang Sosial
2. Penyediaan sarana dan Prasarana Sosial
- 3.Penanggulangan Korban Bencana

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Adapun Tingkat Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20 Target SPM Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pemberian bantuan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS sala Kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan luar panti	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3	Bantuan Sosial bagi korban bencana skala kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Perlindungan dan jaminan social

4.6.3 Realisasi SPM

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh **Dinas Sosial** selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.21 Realisasi SPM Tahun 2023 Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
1	Pemberian bantuan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS sala Kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	70.05 %	Membidangi Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan luar panti	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	90 %	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3	Bantuan Sosial bagi korban bencana skala kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	71,68%	Membidangi Bidang Perlindungan dan jaminan social

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 capaian SPM untuk jenis pelayanan pemberian Bantuan Sosial bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yaitu 70,05 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,62 % dimana pada tahun sebelumnya capaiannya hanya 66,43 %.

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan alokasi anggaran pada kegiatan – kegiatan yang terkait dengan jenis pelayanan ini, dimana pada tahun sebelumnya alokasi anggaran hanya Rp. 915.664.922.

4.6.4 Alokasi Anggaran tahun 2023

Tabel 4.22 Alokasi Anggaran Dinas Sosial

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1.	Bidang Pemberdayaan social			

	Program Pemberdayaan Sosial	313.934.000	163.545.800	52,09%
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	524.988.750	393.726.300	74,99%
	Program Penanganan Bencana	353.466.800	222.275.700	62,88%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	110.731.392	4.200.000	3,79%
3.	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial			
	Program Rehabilitasi sosial	105.370.000	33.580.000	31,86%
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.000.000	0	0%
4.	Sekretariat			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	2.017.536.695	1.877.824.611	93,07 %

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Majene telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas.Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten. Majene adalah sebanyak 17 orang.dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Bidang Pemberdayaan Sosial	4
	Kepala Bidang	1
	Penyuluh Sosial	1
	Penyuluh Sosial	1
	Staf	1
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2
	Kepala Bidang	1
	Pekerja Sosial	1
	Bidang Rehabilitasi Sosial	5
	Kepala Bidang	1
	Penyuluh Sosial	1
	Penyuluh Sosial	1
	Penyuluh Sosial	1
	Staf	1
	Sekretariat	6
	Sekretaris	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
	Perncana Ahli Muda	1

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Staf	3
	Total	17

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Mengharapkan tambahan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial. Secara umum permasalahan yang dihadapi **Dinas Sosial Kab. Majene** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran / APBD;
- Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- Belum sinerginya upaya implementasi SPM
- adanya reconfusing/pengurangan anggaran akibat COVID 19

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

Adapun Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

- Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengai 6 (enam) tahun.
 - Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - Penyediaan layanan pendidikan diwilayah yang kekurangan daya tamping.
 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
 - Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
 - Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
 - Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
 - Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama,suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
- c. Program Pendidikan Non Formal
- Penyediaan layanan pendidikan diwilayah yang kekurangan daya tampung
 - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

2. URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 903.104.077	Rp. 903.104.077	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 115.406.884	Rp. 115.406.884	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Rp. 57.091.850	Rp. 57.091.850	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 1.918.898.389	Rp. 1.918.898.389	100 %

5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	Rp. 848.359.293	Rp. 848.359.293	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	Rp. 608.661.670	Rp. 608.661.670	100 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (≥ 60 Tahun)	Rp. 103.532.000	Rp. 103.532.000	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 4.848.000	Rp. 4.848.000	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Rp. 17.460.000	Rp. 17.460.000	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Rp. 170.289.277	Rp. 170.289.277	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 214.351.000	Rp. 214.351.000	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Rp. 95.889.000	Rp. 95.889.000	100 %
TOTAL ANGGARAN		Rp. 505.7891.440	Rp. 505.7891.440	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk memenuhi target pelayanan Minimal adalah 100%, namun serapan yang maksimal ini belum dibarengi dengan capaian layanan yang optimal sesuai target karena terdapatnya gap kebutuhan dengan realisasi anggaran yang seharusnya dibutuhkan untuk mencapai target 100% pada pemenuhan komponen Standar Pelayanan Minimal.

3.URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, program yang tercakup adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Pemukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023

No	Program	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Anggaran (Rp000)
A	APBD				
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			1.160.470.000,00
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah masyarakat perdesaan yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	Meningkatnya SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	199.000.000,00
		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Sambungan Rumah yang terakses air minum	Terfasilitasinya Penyiapan Kerjasama SPAM	75.000.000,00
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sarana sistem pengolahan air limbah yang disediakan	Terbangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	75.000.000,00

No	Program	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Anggaran (Rp000)
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	115.000.000,00
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta sosialisasi yang dibina teknik pengelolaan air limbah	Terlaksananya Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik"	52.876.500,00
Jumlah (A)					1.677.346.500

No	Program	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Anggaran (Rp000)
B	APBN/DAK				
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah masyarakat perdesaan yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	Meningkatnya SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	6.037.809.000,00
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	5.813.293.000,00

No	Program	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Anggaran (Rp000)
				Skala Permukiman	
Jumlah (B)					11.851.102.000
Jumlah (A)+(B)					13.528.448.500

4. URUSAN PERUMAHAN,PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program dan Kegiatan pendukung penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Majene Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	49.999.525
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	49.999.525
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	-	-
JUMLAH				99.999.050

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Program dan Kegiatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2023 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Majene Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kota	Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa (satpol pp)	Rp.30.000.000,-
2.	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan;peraturan bupati/walikota	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota (satpol pp)	Rp.20.000.000 ,-

b. Program dan Kegiatan Urusan BPBD

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023, program yang tercakup adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

5. URUSAN SOSIAL

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Majene, program yang tercakup adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah;
2. Program pemberdayaan social;
3. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
4. Program rehabilitasi social;
5. Program perlindungan dan jaminan social;
6. Program penanganan bencana;
7. Program taman makam pahlawan;

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2022 yang mencakup Perencanaan Pembangunan Daerah; Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas : (1) Capaian Kinerja Makro, (2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, (3) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; (4) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan (5) Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Berbagai prestasi dan keunggulan serta kekurangan selama kurun waktu 2023 telah disusun dan dilaporkan melalui LPPD ini.

LPPD akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan pada kurun waktu kedepan sehingga pelaksanaan beberapa tugas Urusan Wajib Pelayanan Dasar atau Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah serta Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih terarah dan maksimal sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan capaian kinerja program / serta permasalahan dan alternatif solusi.

Permasalahan yang dihadapi dan tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2023 selanjutnya dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Melalui LPPD ini, juga diharapkan sebagai masukan dari *stakeholder* dalam memberikan pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini bukan hanya sekedar formalitas belaka.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah sebagai laporan secara tertulis sesuai format baku yang telah ditetapkan sebagai sebuah harapan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara sinergitas, keterpaduan dan kesepahaman serta kerjasama dari seluruh unsur OPD dan didukung masyarakat selama kurun tahun 2023 di wilayah Kabupaten Majene sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi secara bersama dan terpadu.

Pemerintah Kabupaten Majene telah berusaha memenuhi komitmen sebagai upaya moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi potensi pada setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene dimasa mendatang. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah penyelenggaraan Urusan Konkuren, Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum; Tugas Pembantuan; dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Adapun hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan di beberapa urusan, tetapi secara keseluruhan menunjukkan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil tersebut dicapai berkat kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Majene dan didukung dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan partisipasi dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat. Dengan terselesaikannya laporan ini, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak pada setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Majene yang telah terlaksana secara harmonis dan ideal dengan mengedepankan slogan **“UMR”** dan **“MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS 2023”** dapat menjadi spirit dalam membangun Majene kedepan, dan harapan kami semoga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua.